



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA MAGELANG



ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA MAGELANG TAHUN 2017

dataGo

Sistem Informasi Manajemen Data Strategis Kota Magelang





LAMBANG DAERAH KOTA MAGELANG

Lambang Kota Magelang berbentuk **perisai dan berupa emblem**, melambangkan kepribadian Nasional serta mencerminkan kekhususan dan tradisi revolusioner Kota Magelang

Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran, murah sandang, murah pangan

Bintang di tengah-tengah, bermakna Pancasila atau dapat juga bermakna bahwa rakyat Kota Magelang ber-Pancasila juga bermakna bahwa rakyat Kota Magelang berkeTuhanan Yang Maha Esa

Bambu Runcing, bermakna keberanian dan kekuatan rakyat didasarkan sejarah perjuangan bangsa mengusir penjajah Belanda dan Inggris dalam revolusi fisik sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diwarisi dari semangat perjuangan dan kepahlawanan

Topi Baja diatas Buku, melambangkan Kota Magelang sebagai Kota pendidikan dan Kota ABRI

Kuning Emas, melambangkan keagungan dan kebahagiaan

Merah, melambangkan keberanian dan jiwa revolusioner

Hijau, melambangkan kesuburan dan kemakmuran

Putih, melambangkan kesucian, kejujuran dan kebersihan

Hitam, melambangkan keadilan, kekuata



SAMBUTAN
WALIKOTA MAGELANG

Assalamualaikum, wr,wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, saya sangat mengapresiasi atas di terbitkannya buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017.

Ketersediaan data yang valid dan objektif menjadi dasar utama untuk melakukan analisis dalam menetapkan kebijakan, sehingga hasil yang didapatkan dari kebijakan yang diterapkan tersebut menjadi tepat dalam mencapai sasaran. Berkaitan dengan hal yang tersebut diatas, publikasi buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 menggambarkan perkembangan perekonomian Kota Magelang selama satu tahun yang dapat dipertanggung jawabkan dan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.

Akhirnya kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang serta semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, wr, wb



WALIKOTA MAGELANG

Dr. SIGIT WIDYONINDITO, MT



KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

Assalamualaikum, wr,wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Analisa Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 bisa tepat pada waktunya.

Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi merupakan publikasi indikator pengukur kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan, khususnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sektor-sektor yang mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kota Magelang. Dengan buku ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan maupun sebagai bahan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan buku ini. Kami sadar bahwa buku ini masih banyak kekurangan sehingga terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan disbanding tahun sebelumnya.

Wassalamualaikum, wr, wb



KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA MAGELANG.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	ix1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud	4
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Sasaran	5
1.5. Manfaat.....	5
1.6. Ruang Lingkup.....	6
1.7. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	9
2.1. Pengertian dan Fungsi Indikator makro Ekonomi	9

2.2. Teori Ekonomi Perekonomian Terbuka.....	15
BAB III METODE PENGKAJIAN.....	20
3.1. Jenis dan Sumber Data	20
3.2. Teknik Analisis Data	20
3.2.1. Grafik dan Tabel	22
3.2.2. Analisis Internal dan Analisis Eksternal	23
3.2.3. Perhitungan Nilai ICOR.....	25
3.2.4. Analisis Korelasi.....	26
3.2.5. Analisis Keuangan Daerah	27
3.3. Asumsi-asumsi	29
3.4.Periode Penelitian.....	30
BAB IV ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA, JAWA TENGAH DAN KOTA MAGELANG	31
4.1. Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Indonesia	31
4.1.1.Produk Domestik Bruto	31
4.1.2. Inflasi	34
4.1.3. Nilai Tukar	36

4.1.4. Neraca Perdagangan.....	37
4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia	39
4.2. Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah	41
4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	41
4.2.2. Inflasi	43
4.2.3. Keuangan Daerah	45
4.2.4. Neraca Perdagangan.....	47
4.2.5. Indeks Pembangunan Manusia	48
4.3. Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang.....	51
4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	51
4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	54
4.3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	57
4.3.4. Laju Implisit PDRB.....	58
4.3.5. Pertumbuhan PDRB Per Kapita	60
4.3.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Lapangan Usaha (Andalan dan Unggulan) dan Pengeluaran.....	63
4.3.7. Upah Minimum Kota.....	733

4.3.8. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	74
4.3.9. Kesempatan Kerja dan Pengangguran	766
4.3.10. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan	799
4.3.11. Kesenjangan Intra Wilayah	833
4.3.12. Tabungan Masyarakat dan Pinjaman.....	855
4.3.13. Investasi dan Suku Bunga Perbankan.....	877
4.3.14. ICOR	888
4.3.15. Keuangan Daerah.....	90
4.3.16. Utang Pemerintah Daerah	977
4.3.17. Penduduk dan Konsumsi	988
4.3.18. Indeks Pembangunan Manusia.....	100
4.4. Analisis Komparatif Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Dengan Kota/Kabupaten Lain di Eks Karesidenan Kedu	1022
4.4.1. Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Kota Magelang.....	1022
4.4.2. Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Eks Karesidenan Kedu Lainnya	1055

4.4.3. Perbandingan Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Kota Magelang dan di Eks Karesidenan Kedu Lainnya	1111
4.5. Permasalahan Utama Makro Ekonomi Kota Magelang.....	1144
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	11921
5.1. Kesimpulan	11921
5.2. Rekomendasi Kebijakan	1277
Daftar Pustaka	1322
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kerangka Acuan Penentuan Sektor Andalan Kota Magelang....	24
Tabel 3.2. Kerangka Acuan Penentuan Sektor Unggulan Kota Magelang..	25
Tabel 4.3.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 (ADHB dalam Juta Rupiah).....	52
Tabel 4.3.2. PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 (ADHK dalam Juta Rupiah).....	54
Tabel 4.3.3. PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 (ADHB dalam Juta Rupiah).....	55
Tabel 4.3.4. PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 (ADHK dalam Juta Rupiah).....	57
Tabel 4.3.5. Pertumbuhan (%) PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Kariseidenan Kedu Periode 2012 – 2016 ADHK.....	58
Tabel 4.3.6. Laju Implisit PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan EKs Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 (%).....	60
Tabel 4.5.7. Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Kota MAGelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 ADHB.....	61

Tabel 4.3.8. Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016 ADHK	63
Tabel 4.3.9. Sektor Andalan Kota Magelang Periode 2012 – 2016	67
Tabel 4.3.10. Sektor Unggulan Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	70
Tabel 4.3.11. Distribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDRB ADHB Kota Magelang Periode 2012 – 2016	71
Tabel 4.3.12. Upah Minimum di Kota Magelang dan Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016	74
Tabel 4.3.13. Kemiskinan di Kota Magelang Periode 2012 – 2016	79
Tabel 4.3.14. Presentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	83
Tabel 4.3.15. ICOR, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Investasi Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	89
Tabel 4.3.16. APBD Kota Magelang Tahun 2016.....	90
Tabel 4.3.17. Indeks Ruang Fiskal Kota Magelang Periode 2012–2016....	96
Tabel 4. 3.18. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	100
Tabel 4.3.19. Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karisidenan Kedu Periode 2012 – 2016.....	101
Tabel 4.4.1. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Periode 2011 – 2015	116
Tabel 4.4.2. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Magelang Periode 2011 – 2015	117

Tabel 4.4.3. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purworejo Periode 2011 – 2015	117
Tabel 4.4.4. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2015	117
Tabel 4.4.5. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung Periode 2011 – 2015.....	118
Tabel 4.4.6. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Wonosobo Periode 2011 – 2015	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel Makro Ekonomi dalam Perekonomian Terbuka.....	18
Gambar 4.1.1. Produk Domestik Bruto Indonesia (Triliun Rupiah) menurut Harga Konstan 2010 Periode 2011 – 2015	31
Gambar 4.1.2. Pertumbuhan PDB, PDB Perkapita dan Penduduk Indonesia Periode 2012 – 2015	33
Gambar 4.1.3. Inflasi Indonesia menurut Kelompok Barang/Jasa Periode 2012 – 2015	35
Gambar 4.1.4 Nilai Tukar Rupiah (Rp) terhadap USD Periode 2011 – 2015.....	37
Gambar 4.1.5. Neraca Perdagangan	38
Gambar 4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia	40
Gambar 4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah) Menurut Harga Konstan 2010 Periode 2012 – 2015	42
Gambar 4.2.2. Pertumbuhan PDB, PDBR Perkapita, Penduduk Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2015.....	43
Gambar 4.2.3. Inflasi Provinsi Jawa Tengah.....	45
Gambar 4.2.4. Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah) Periode 2012 – 2015.....	46
Gambar 4.2.5. Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah) Periode 2011 – 2015.....	48
Gambar 4.2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.....	50

Gambar 4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	75
Gambar 4.3.2. Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2011 – 2014.....	78
Gambar 4.3.3. Indeks Williamson Kota Magelang Periode 2011 – 2015...	84
Gambar 4.3.4 Tabungan dan Pinjaman di Kota Magelang Periode 2012 – 2016.....	84
Gambar 4.3.5. Tren Pendapatan Kota Magelang Periode 2010 – 2015.....	92
Gambar 4.3.6. Proporsi Pendapatan Kota Magelang Periode 2010 – 2015.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	135
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	136
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	137
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	138
Lampiran 5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	139
Lampiran 6. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Lapangan Usaha	140
Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha.....	141
Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha.....	142
Lampiran 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan.....	143
Lampiran 10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan.....	144

Lampiran 11. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan.....	145
Lampiran 12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan.....	146
Lampiran 13. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan.....	147
Lampiran 14. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan.....	148
Lampiran 15. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan.....	149
Lampiran 16. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan.....	150
Lampiran 17. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Magelang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa Kota Magelang:

1. Bersama-sama Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga digolongkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yakni kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam hal ini, secara umum, Kota Magelang memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah karena terletak pada posisi strategis, yakni berada di jalur utama Semarang (Pusat Kegiatan Nasional/PKN)-Yogyakarta (Pusat Kegiatan Nasional/PKN)¹;
2. Dikategorikan ke dalam Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Fungsi

¹ PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Purwomanggung adalah sebagai fungsi pengembangan pusat pelayanan lokal dan provinsi;

3. Masuk ke dalam rencana pengembangan jalan arteri primer Bawen-Magelang-Perbatasan Yogyakarta, jalan kolektor primer Magelang-Salatiga, terminal penumpang jalan tipe A, kereta api komuter jalur Magelang-Yogyakarta, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
4. Menjadi kawasan lindung yang dikelola masyarakat, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, imbuhan air, perlindungan plasma nutfah, hutan rakyat, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peruntukan peternakan besar dan kecil, peternakan unggas, dan lahan perikanan budidaya air tawar; dan
5. Masuk ke dalam kawasan rawan letusan gunung berapi.

Berdasarkan pada Perda RTRW di atas, maka fungsi yang diarahkan untuk diemban oleh Kota Magelang sangat kental dengan nuansa pembangunan ekonomi, baik dari skala kecil hingga pada skala besar. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kota Magelang pada saat ini secara menyeluruh dan kondisi perekonomian Kota Magelang pada masa yang akan datang perlu dipahami dengan baik untuk mengemban fungsi dimaksud. Pengembanan fungsi tersebut dapat diukur ketercapaiannya berdasarkan pada penyusunan dan

implementasi kebijakan-kebijakan, program-program, dan kegiatan-kegiatan yang relevan dan tepat.

Selanjutnya, salah satu syarat yang diperlukan untuk memahami kondisi perekonomian Kota Magelang saat ini dan sekaligus tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang adalah dipahaminya pergerakan indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang. Pemahaman yang memadai mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang akan mengarahkan penyelenggaraan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan meningkatkan respon masyarakat Kota Magelang dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka perlu disusun sebuah buku yang berisikan informasi-informasi penting mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan. Indikator-indikator makro ekonomi dimaksud berikutnya diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Magelang sekaligus memberikan arah bagi Kota Magelang dan menjalankan perannya di bidang perekonomian Jawa Tengah dan nasional.

1.2. Maksud

Maksud dari disusunnya buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang ini adalah untuk menyediakan referensi yang berisi data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan ekonomi Kota Magelang yang terukur berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi. Selain itu, buku ini disusun dengan maksud menyajikan analisa terhadap capaian indikator makro ekonomi kota magelang untuk rentang waktu 2010-2015

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang adalah

- (1) Mendeskripsikan kondisi pembangunan ekonomi Kota Magelang,
- (2) Menggali permasalahan makro ekonomi Kota Magelang,
- (3) Menjelaskan keterkaitan variabel-variabel makro ekonomi Kota Magelang, dan
- (4) Memberi bahan evaluasi terhadap capaian indikator makro ekonomi sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

1.4. Sasaran

Agar tujuan penyusunan buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang dapat tercapai dan tercipta suatu gambaran komprehensif, maka beberapa sasaran perlu untuk diwujudkan, yakni:

1. Terpilih dan terdefinisiannya indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang;
2. Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan guna menjelaskan dinamika indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang yang telah terpilih;
3. Terepresentasikannya makna dari indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang.

1.5. Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang adalah

- (1) Dapat dipahaminya kondisi perekonomian Kota Magelang pada saat ini dan dapat diprediksikan perkembangan ekonomi Kota Magelang di masa depan,
- (2) Dapat diketahui arah pembangunan Kota Magelang yang terlihat dari hasil analisis terhadap indikator-indikator makro ekonomi yang ada, dan

- (3) Dapat digunakan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kota Magelang pada masa yang akan datang.

1.6. Ruang Lingkup

Materi dalam buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang ini merupakan indikator, beserta data, informasi dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kota Magelang dalam kurun waktu paling tidak lima tahun terakhir.

1.7. Sistematika Penulisan

Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

- Latar Belakang,
- Maksud
- Tujuan,
- Sasaran,
- Manfaat,
- Ruang Lingkup,
- Sistematika Penulisan.

B. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi:

- Indikator Makro Ekonomi,
- Berbagai Indikator Makro Ekonomi,
- Fungsi Indikator Makro Ekonomi,
- Definisi Indikator-Indikator Makro Ekonomi yang Diteliti.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi:

- Jenis dan Sumber Data,
- Teknik Analisis Data,
- Asumsi-Asumsi.

D. BAB V GAMBARAN UMUM INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA, JAWA TENGAH DAN KOTA MAGELANG

Bab ini berisi:

- Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Indonesia
- Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah
- Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang
- Analisis Komparatif Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang dengan Kabupaten lain di eks Karesidenan Kedu.

E. BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi:

- Kesimpulan
- Rekomendasi Kebijakan.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Pengertian dan Fungsi Indikator makro Ekonomi

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, dan tahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara.

Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Indikator makro ekonomi yang umum dipublikasikan di Indonesia adalah produk domestik bruto (PDB) dan PDRB, indeks harga konsumen (IHK), hutang pemerintah, nilai tukar, neraca

transaksi berjalan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan cadangan devisa. Indikator-indikator tersebut dipublikasikan oleh Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF), Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.

Secara lebih spesifik, dalam rangka mencapai tujuan penulisan buku ini, maka terdapat indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator dimaksud adalah PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, neraca perdagangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB (berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran), PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, rasio Gini, indeks Williamson, tabungan masyarakat, pinjaman, investasi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), tingkat bunga perbankan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, indeks ruang fiskal daerah, utang pemerintah daerah, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi masyarakat, UMK, garis kemiskinan, dan *Natural rate of unemployment*. Definisi dari tiap-tiap indikator makroekonomi tersebut selanjutnya diungkapkan sebagai berikut:

1. PDB adalah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa final yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu.

2. Tingkat (laju) inflasi adalah persentase perubahan indeks harga konsumen periode t terhadap periode $t-1$. Tingkat inflasi dirumuskan sebagai berikut: $[(IHK_t - IHK_{t-1}) \div IHK_{t-1}] \times 100\%$.
3. Nilai tukar adalah perbandingan harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.
4. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara pada periode tertentu yang diukur dengan menggunakan mata uang yang berlaku.
5. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
6. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.
7. PDRB perkapita adalah hasil bagi antara PDRB di suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Dalam hal ini jumlah penduduk yang dipakai adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

8. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai PDRB dengan harga konstan pada periode t terhadap periode t-1. Pertumbuhan Ekonomi dirumuskan sebagai berikut: $[(PDRB_t - PDRB_{t-1}) \div PDRB_{t-1}] \times 100\%$.
9. Tingkat kesempatan kerja adalah tingkat ketersediaan lapangan kerja untuk diisi oleh para pekerja. Atau dengan perkataan lain, tingkat kesempatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja terhadap total angkatan kerja.
10. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.
11. Tingkat kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
12. Rasio (Indeks) Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk.
13. Indeks Williamson adalah formulasi yang dipergunakan untuk menghitung distribusi pendapatan antar daerah (regional).
14. Tabungan masyarakat adalah total tabungan rumah tangga dan perusahaan-perusahaan.

15. Pinjaman adalah hutang terhadap perbankan dalam wujud moneter.
16. Investasi adalah "suatu komitmen untuk mengalokasikan sumberdaya/uang saat ini pada satu atau lebih aset yang akan dikelola dalam jangka panjang dengan harapan menghasilkan kesejahteraan di masa mendatang" (Kameo et al., 2012, mengutip Jones, 2000 dan Reilly dan Norton 2006). Investasi dapat dibagi ke dalam empat unsur penting, yakni (1) waktu terjadinya komitmen sumberdaya, (2) aset, (3) pengelolaan jangka panjang untuk mengatasi risiko, dan (4) harapan menghasilkan kesejahteraan [Kameo et al. (2012) mengutip Jones (2000) dan Reilly dan Norton (2006)].
17. ICOR adalah besarnya jumlah investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan tambahan output sebanyak satu unit.
18. Tingkat (suku) bunga perbankan adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena telah memberikan pinjaman.
19. Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

20. Rasio ketergantungan daerah adalah rasio yang menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
21. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
22. Indeks ruang fiskal daerah adalah indikator umum yang menggambarkan kaitan antara ruang fiskal daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
23. Utang pemerintah daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke daerah pabean (negara) lain.
25. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
26. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki

mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

27. Konsumsi masyarakat adalah kegiatan masyarakat menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
28. UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam satu kabupaten/kota.
29. Garis kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
30. *Natural rate of unemployment* adalah tingkat pengangguran saat pasar tenaga kerja berada dalam kondisi ekuilibrium. *Natural rate of unemployment* dihitung dengan menggunakan rumus “jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaannya dibagi total pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan pengangguran yang mendapatkan pekerjaan dikalikan 100 persen”.

2.2. Teori Ekonomi Perekonomian Terbuka

Di dalam perekonomian terbuka, pengeluaran tidak harus sama dengan output. Demikian pula, tabungan tidak harus sama dengan investasi. Perekonomian terbuka dapat diformulasikan sebagai berikut: $Y = C + I + G + (X-M)$, dengan Y adalah output

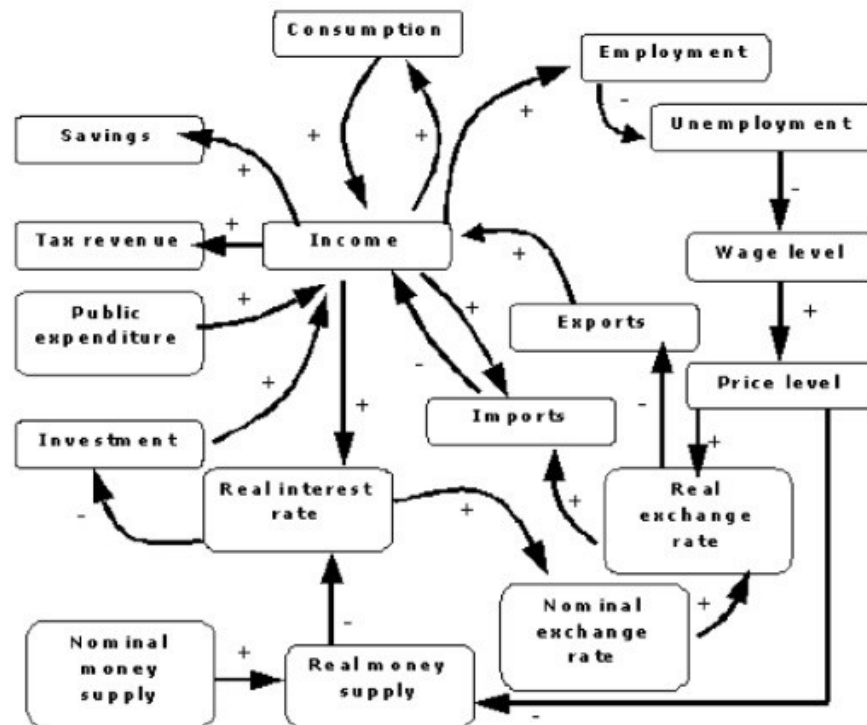
(*income*). C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran investasi sektor bisnis, G adalah pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor, $X-M$ adalah ekspor bersih.

Persamaan $Y = C + I + G + (X-M)$ dapat dimodifikasi menjadi $NX = Y - (C + I + G)$. dengan $(C + I + G)$ adalah pengeluaran domestik. Suatu perekonomian akan mengalami surplus perdagangan apabila output lebih besar dari pengeluaran domestik, atau ekspor lebih dari impor. Sebaliknya, suatu perekonomian akan mengalami defisit perdagangan apabila output kurang dari pengeluaran domestik, atau ekspor kurang dari impor.

Persamaan $NX = Y - (C + I + G)$ selanjutnya dapat dimodifikasi menjadi $NX = (Y - C - G) - I$ dengan $Y - C - G$ adalah tabungan nasional, yakni total tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah. Negara yang mengalami surplus perdagangan akan berada pada posisi dimana tabungan nasional lebih besar dari pengeluaran investasi. Dalam kondisi seperti ini, suatu perekonomian akan menjadi pemberi pinjaman (*net lender*) kepada perekonomian lain. Sebaliknya, kondisi ($S < I$) yang dialami oleh suatu perekonomian yang mengalami defisit perdagangan yang menyebabkan perekonomian tersebut meminjam dari perekonomian lain (*net borrower*).

Variabel-variabel sebagaimana dijelaskan merupakan variabel-variabel makro ekonomi. Variabel-variabel tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu variabel berkinerja buruk, maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap variabel lain. Namun, apabila variabel lain berkinerja lebih baik, dan lebih dominan, maka variabel makro ekonomi yang berkinerja baik tersebut sangat mungkin dapat memperbaiki variabel makro ekonomi yang berkinerja buruk. Secara singkat, keterkaitan antara variabel-variabel makro ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel Makro Ekonomi dalam Perekonomian Terbuka



Sumber: Piana (2001).

Apabila suatu perekonomian terbuka menemui masalah, yakni terdapat variabel-variabel makro ekonomi yang tidak berkinerja baik, maka perekonomian tersebut dapat menerapkan kebijakan makro ekonomi, yakni kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah pengelolaan terhadap jumlah uang beredar. Kebijakan yang bersifat ekspansif akan diambil oleh suatu perekonomian manakala

permasalahan lebih kepada bagaimana menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan yang bersifat kontraktif diambil untuk mengatasi gejolak kenaikan harga-harga secara umum.

Kota Magelang adalah bagian dari Jawa Tengah dan Indonesia yang menganut perekonomian terbuka. Oleh karena itu, indikator-indikator makro ekonomi Kota Magelang diprediksi akan terkait satu sama lain, termasuk terkait dengan indikator makro ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia. Apabila terjadi permasalahan, kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki perekonomian Kota Magelang adalah dapat dari sisi fiskal ataupun dari sisi moneter. Mengingat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dominan dikelola oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia, maka upaya penyelesaian permasalahan makro ekonomi Kota Magelang juga turut dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia.

BAB III

METODE PENGKAJIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Jakarta, Jawa Tengah, dan Kota Magelang), Bank Indonesia, Laporan Kementerian Keuangan, Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Magelang.

3.2. Teknik Analisis Data

Indikator-indikator makro ekonomi yang dikaji di dalam buku ini dikelompokkan ke dalam empat unit analisis (satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian), yakni Indonesia, Jawa Tengah, Kota Magelang dan eks Karesidenan Kedu. Indikator makro ekonomi yang dikaji dalam konteks Indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar, neraca perdagangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk konteks Jawa Tengah, indikator makro ekonomi yang dikaji adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, keuangan daerah, neraca perdagangan, dan IPM. Sementara itu, untuk konteks Kota Magelang, indikator makro ekonomi yang dianalisis adalah PDRB

berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran, PDRB Per Kapita, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, kesempatan kerja dan pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, kesenjangan intra wilayah, tabungan masyarakat dan pinjaman, investasi dan tingkat bunga perbankan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, indeks ruang fiskal daerah, utang pemerintah daerah, ekspor-impor, penduduk dan konsumsi, dan indeks pembangunan manusia. Untuk konteks eks Karesidenan Kedu, indikator makro ekonomi yang dikaji adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, UMK, garis kemiskinan, IPM, dan gini rasio. Untuk eks Karesidenan Kedu, pembahasan mengenai indikator-indikator makro ekonomi adalah terkait dengan hubungan antar indikator-indikator tersebut.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam teknik analisis tersebut adalah grafik, tabel, indeks dominasi sektoral, indeks potensi perkembangan sektoral, *static location quotient*, *dynamic location quotient*, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, *incremental capital output ratio* (ICOR), dan uji korelasi.

Lebih lanjut, grafik/tabel digunakan untuk menjelaskan pergerakan indikator-indikator makro ekonomi. Indeks dominasi sektoral, indeks potensi perkembangan sektoral, *static location quotient*, dan *dynamic location quotient* digunakan untuk mengetahui sektor andalan dan sektor unggulan di Kota Magelang. Derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kondisi umum keuangan daerah Kota Magelang. ICOR digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi di Kota Magelang. Sementara itu, uji korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar indikator-indikator makro ekonomi tertentu. Secara lebih spesifik, alat-alat analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Grafik dan Tabel

Grafik adalah salah satu alat analisis utama dalam kajian ekonomi. Grafik berperan untuk menunjukkan hubungan variabel-variabel ekonomi secara visual (Sugiarto et al., 2007). Dalam kajian ini, grafik digunakan untuk menjelaskan hubungan antar indikator-indikator makro ekonomi yang secara teoritis memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Tabel adalah model penyajian yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu.

3.2.2. Analisis Internal dan Analisis Eksternal

Dalam menganalisis posisi ekonomi dan kontribusi PDRB Kota Magelang diantara kabupaten/kota sekitar di Jawa Tengah, kajian ini menggunakan analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal terdiri dari Analisis Indeks Dominasi (AID), Analisis Indeks Potensi Perkembangan (AIPP), dan sektor andalan. AID terdiri dari dua sub analisis, yakni analisis pangsa dan Indeks Dominasi Sektoral (IDS). Rumus untuk menghitung pangsa (dalam persen) adalah:

$$\text{Pangsa}_{\text{lapangan usaha } i} = v_i \div Y$$

Dengan v_i adalah nilai tambah lapangan usaha i dan Y adalah PDRB. IDS dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IDS} = n v_i \div Y$$

n adalah jumlah lapangan usaha. Selanjutnya, AIPP terdiri dari dua sub analisis, yakni laju pertumbuhan (dalam persen) dan indeks potensi perkembangan sektoral (IPPS). Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan adalah:

$$g_i = (v_{it} \div v_{i0})^{1 \div (t-0)} - 1$$

g_i adalah laju pertumbuhan lapangan usaha i . Indeks t dan 0 menunjukkan tahun akhir dan tahun awal. Sementara itu, rumus untuk menghitung IPPS adalah:

$$\text{IPPS}_i = [(1+g_i) \div (1+G)]^t$$

G pada formula IPPS adalah laju pertumbuhan dari seluruh lapangan usaha. Terakhir dalam analisis internal dilakukan penentuan sektor andalan dengan kerangka acuan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Acuan Penentuan Sektor Andalan Kota Magelang

Kriteria	IPPS < 1	IPPS ≥ 1
IDS < 1	(1)	(2)
IDS ≥ 1	(3)	(4)

Keterangan: nomor (4) adalah sektor andalan

Berikutnya, analisis eksternal terdiri dari Analisis Indeks Lokasi Statis (AILS), Analisis Indeks Lokasi Dinamis (AILD), dan sektor unggulan. Dalam melakukan AILS dihitung nilai SLQ_{ij} . SLQ_{ij} adalah nilai koefisien lokasi statis lapangan usaha i di daerah j . Rumus untuk menghitung SLQ adalah:

$$SLQ_{ij} = IDS_{ij} \div IDS_i$$

Jika nilai $SLQ \geq 1$, maka lapangan usaha i di daerah j mampu bersaing. Sebaliknya, jika nilai $SLQ < 1$, maka lapangan usaha i di daerah j tidak mampu bersaing. AILD dilakukan dengan menghitung nilai DLQ_{ij} . DLQ_{ij} adalah nilai koefisien lokasi dinamis lapangan usaha i di daerah j . Rumus untuk menghitung DLQ adalah:

$$DLQ_{ij} = IPPS_{ij} \div IPPS_i$$

Jika nilai $DLQ \geq 1$, maka lapangan usaha i di daerah j mampu bersaing di masa depan. Sebaliknya, jika nilai $DLQ < 1$, maka lapangan

usaha i di daerah j tidak mampu bersaing di masa depan. Terakhir dalam analisis eksternal, sektor unggulan ditentukan dengan kerangka acuan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kerangka Acuan Penentuan Sektor Unggulan Kota Magelang

Kriteria	DLQ < 1	DLQ ≥ 1
SLQ < 1	(1)	(2)
SLQ ≥ 1	(3)	(4)

Keterangan: nomor (4) adalah sektor unggulan

3.2.3. Perhitungan Nilai ICOR

ICOR perlu diketahui untuk mengetahui hubungan antara PDRB dengan investasi. Untuk mendapatkan hubungan antara PDRB dengan investasi yang *smooth*, disarankan penghitungan nilai ICOR menggunakan data *time series* dengan mempertimbangkan faktor tenggang waktu (*time lag*). Nilai ICOR dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

$$\text{Log}Y_t = \alpha + \beta I_{t-n} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan di atas, nilai ICOR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$ICOR_t = \frac{\sum_{t=0}^{t-n} I_{t-n}}{\beta Y_t}$$

dimana:

Y = PDRB

I = investasi

β = prosentase kenaikan PDRB karena kenaikan 1 persen investasi

t = tahun

n = tenggang waktu yang digunakan

Kelebihan metode di atas adalah mampu menghitung nilai ICOR dengan mempertimbangkan tenggang waktu yang merupakan ciri utama investasi, dimana *output* tidak dapat dihasilkan secara penuh pada tahun pertama investasi. Namun karena permasalahan kelengkapan data yang tersedia, maka dalam kajian ini perhitungan ICOR dihitung berdasarkan rumus

$$ICOR_t = \frac{I_t}{\Delta Y_t}$$

Dengan I_t adalah nilai investasi dan ΔY_t adalah perubahan nilai PDRB.

3.2.4. Analisis Korelasi

Hubungan antar indikator makro ekonomi dalam buku ini akan dievaluasi dengan menggunakan metode korelasi. Metode tersebut mengukur kekuatan hubungan antar indikator makro ekonomi. Hubungan dimaksud dikatakan kuat apabila nilai koefisien korelasinya $\geq 0,8$.

3.2.5. Analisis Keuangan Daerah

Tiga alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi umum keuangan daerah Kota Magelang adalah derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Formula yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi adalah $[\text{PAD} \div \text{Total Pendapatan Daerah}] \times 100\%$. Derajat desentralisasi memberikan pengertian bahwa semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kriteria ukuran derajat desentralisasi adalah 0-10% (sangat kurang); 10,1-20% (kurang); 20,1-30% (sedang); 30,1-40% (cukup); 40,1-50% (baik); dan > 50% (sangat baik).

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan formula berikut: $(\text{Pendapatan Transfer} \div \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$. Semakin tinggi rasio ketergantungan daerah, itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula berikut: $[\text{PAD} \div (\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})] \times 100\%$. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa

pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Secara umum, indikator makro ekonomi adalah petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan makro ekonomi. Indikator makro ekonomi juga merupakan refleksi dari suatu keadaan makro ekonomi. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat menjadi penolong dalam mengukur perubahan makro ekonomi.

Indikator makro ekonomi yang baik memiliki beberapa ciri, yakni: sah (valid), objektif, sensitif, dan spesifik. Sah (valid) artinya indikator makro ekonomi tersebut dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya. Objektif artinya untuk hal yang sama indikator makro ekonomi memberikan hasil yang sama pula walaupun dipakai oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kemudian sensitif artinya indikator makro ekonomi tersebut mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun. Terakhir, spesifik artinya indikator makro ekonomi tersebut hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

Berdasarkan pada sifatnya, indikator makro ekonomi dapat bersifat tunggal atau jamak (komposit). Contoh indikator makro ekonomi yang bersifat tunggal misalnya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, contoh indikator makro

ekonomi yang bersifat jamak (komposit) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.3. Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi diperlukan sebagai syarat ketepatan memberikan interpretasi terhadap hasil kajian. Seringkali, hasil kajian ilmiah tidak terlalu berdampak terhadap dunia empirik karena tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang mendasari analisis. Oleh karena itu di dalam kajian ini disajikan asumsi-asumsi sebagai dasar validitas analisis. Asumsi-asumsi dimaksud adalah:

1. Arah kebijakan dan strategi makro ekonomi nasional Indonesia dan Jawa Tengah tidak berubah, yakni kebijakan ekonomi selalu berprioritas pada lapangan usaha unggulan dan pembangunan infrastruktur.
2. Tidak terjadi gejolak ekonomi pasar yang ekstrim baik nasional maupun internasional.
3. Tidak terjadi bencana alam dan tanah longsor.
4. Tingkat alih fungsi lahan pada "*rate*" yang sama.
5. Hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja kondusif.
6. Arus migrasi, baik yang masuk ke Kota Magelang maupun yang keluar Kota Magelang, berada pada "*rate*" yang sama.

7. Analisis makro tidak mengenal batas administrasi, namun zona ekonomi.

3.4. Periode Penelitian

Periode studi terhadap indikator makro ekonomi Kota Magelang dalam kajian ini adalah periode 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

BAB IV

ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA, JAWA TENGAH DAN KOTA MAGELANG

4.1. Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Indonesia

4.1.1. Produk Domestik Bruto

Mengamati data yang disajikan dalam Statistik Indonesia 2016, maka nampak bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut harga konstan 2010, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada periode waktu 2011 hingga 2015.

**Gambar 4.1.1. Produk Domestik Bruto Indonesia (Trilliun Rupiah)
Menurut Harga Konstan 2010 Periode 2011-2015**



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

Namun, jika diamati dengan lebih seksama, maka pertumbuhan PDB Indonesia menurut harga konstan 2010, periode 2012-2015 ternyata memiliki kecenderungan menurun. Pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2012 sebesar 6,03%, tidak diikuti pertumbuhan yang setidaknya sama atau lebih besar pada tahun 2013. Pertumbuhan PDB pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,56%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2014, dan 2015 dimana pertumbuhan PDB sebesar 5,02% dan 4,79%.

Tidak hanya pertumbuhan PDB Indonesia yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan PDB Perkapita Indonesia juga mengalami penurunan. Nampak pada Gambar 4.1.2., pertumbuhan PDB Perkapita tahun 2012 sebesar 4.55% tidak diikuti pertumbuhan PDB Perkapita yang lebih tinggi pada tahun 2013, yang hanya sebesar 4,12%. Begitu pula tahun 2014, pertumbuhan PDB Perkapita sebesar 3,63%, dan 2015 sebesar 3,44%.

Tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang juga memiliki pola sama dengan pertumbuhan PDB dan PDB Perkapita. Pada tahun 2012, pertumbuhan penduduk sebesar 1,40%, tahun 2013 sebesar 1,39%, tahun 2014 sebesar 1,37% dan 1,31% pada tahun 2015. Data ini menunjukkan bahwa ada

relasi yang positif antara output yang dihasilkan penduduk dalam suatu negara dengan jumlah penduduknya.

Ketika besarnya pertumbuhan penduduk berkurang dari tahun ke tahun, nampak bahwa program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk mengalami keberhasilan. Namun jika hal ini berdampak pada menurunnya PDB, maka perlu dipikirkan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun pelatihan ketrampilan kerja.

Gambar 4.1.2. Pertumbuhan PDB, PDB Perkapita dan Penduduk Indonesia Periode 2012-2015



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

4.1.2. Inflasi

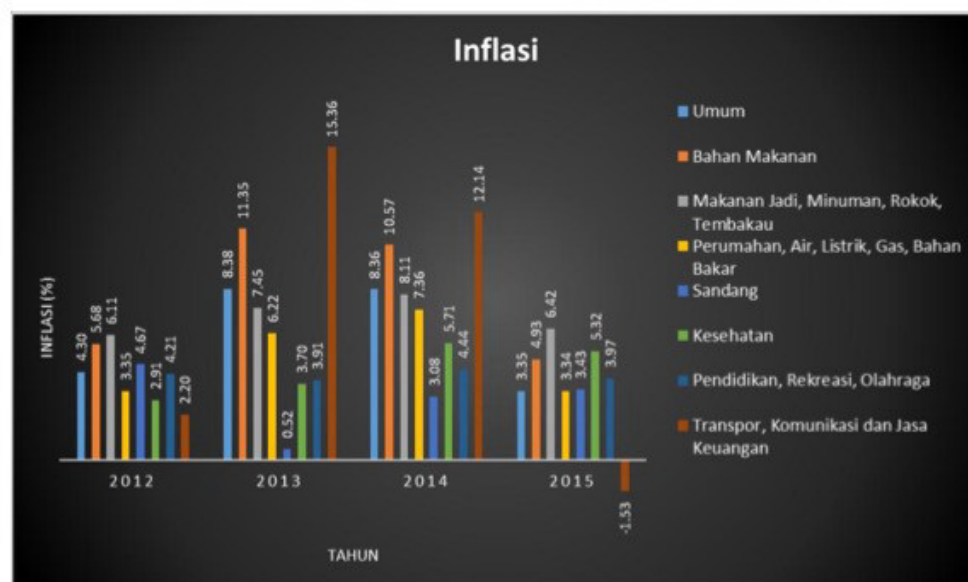
Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi secara terus menerus pada periode waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Dari Gambar 4.1.3., terlihat bahwa inflasi terjadi pada periode 2012-2015 sangat fluktuatif. Inflasi pada tahun 2012 sebesar 4,30% kemudian melonjak sampai dengan 8,38% pada tahun 2013. Kenaikan yang besar ini bertahan pada tahun 2014, yakni sebesar 8,36%. Namun pada tahun 2015, kembali turun hingga 3,35%. Lonjakan inflasi pada tahun 2013 lebih disebabkan kenaikan harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, disusul kelompok bahan makanan. Komoditas yang memberikan sumbangan atas inflasi pada tahun 2013, yakni premium sebesar 1,17%, tarif angkutan dalam kota sebesar 0,75%, bawang merah sebesar 0,38%, tarif listrik sebesar 0,38%, cabai merah sebesar 0,31%, ikan segar sebesar 0,3%, beras sebesar 0,2%, nasi dengan lauk sebesar 0,2%, tarif sewa rumah sebesar 0,2%, tarif angkutan udara sebesar 0,18%, upah tukang bukan mandor sebesar 0,16% dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014, dimana kelompok transpor, komunikasi dan jasa

keuangan, dan kelompok bahan makanan memberikan kontribusi yang besar atas naiknya inflasi pada tahun tersebut.

Pada tahun 2014, komoditas yang memberikan sumbangan atas inflasi, antaranya premium yang memberikan sumbangan atas inflasi sebesar 1,04%, tarif listrik 0,64%, angkutan dalam kota 0,63%, cabai merah 0,43%, beras 0,38%, bahan bakar rumah tangga 0,37%, tarif angkutan udara sebesar 0,22%, cabai rawit sebesar 0,19% dan nasi dengan lauk sebesar 0,18%. Tingginya inflasi pada tahun 2013 dan 2014 terjadi karena adanya dampak dari penyesuaian harga premium dan solar.

**Gambar 4.1.3. Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang/Jasa
Periode 2012-2015**



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

4.1.3. Nilai Tukar

Indikator makro yang juga sering dipakai untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia adalah nilai tukar. Pada Gambar 4.1.4. dapat diamati bagaimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami pelemahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011 sebesar 9.068, menurun pada tahun berikutnya yakni sebesar 9.670 pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sampai pada nilai 12.189. Hal ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2014 dan 2015, dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sebesar 12.440 dan turun sampai pada nilai 13.795.

Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para eksportir, karena nilai barang dan jasa yang dieksporakan terasa lebih murah bagi para pembeli dari negara lain sehingga barang dan jasa mampu bersaing pada pasar internasional. Namun tidak demikian bagi para import, harga barang impor menjadi lebih mahal. Jika hal ini berkenaan dengan barang jadi, maka perlu dipikirkan adanya strategi substitusi impor. Berbeda jika barang yang diimpor adalah bahan baku, hal ini akan menaikkan biaya produksi usaha-usaha yang menggunakan bahan baku yang diimpor. Untuk bertahan, para pengusaha perlu lebih banyak menggunakan bahan baku domestik untuk mengurangi biaya produksi.

Gambar 4.1.4. Nilai Tukar Rp terhadap USD Periode 2011-2015



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

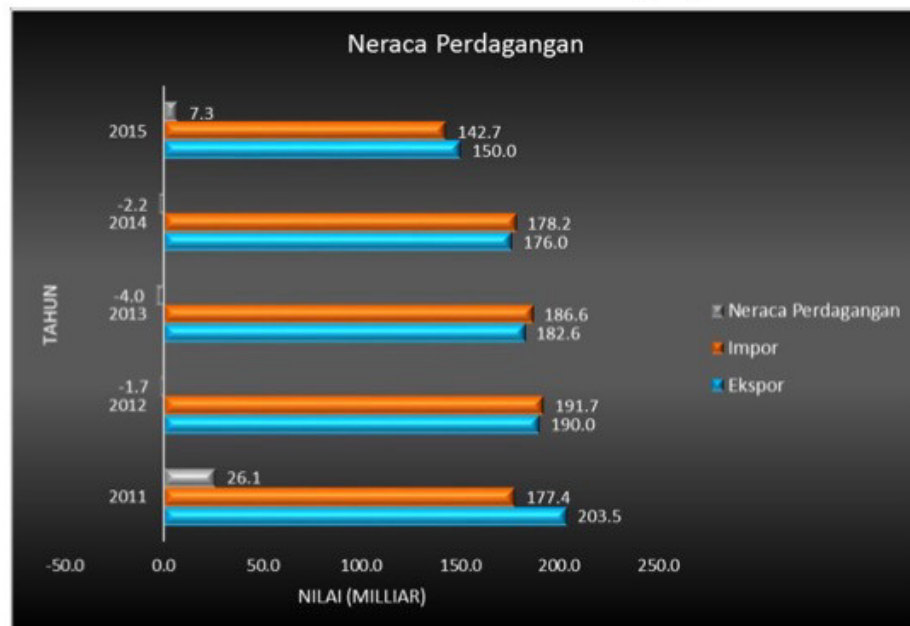
4.1.4. Neraca Perdagangan.

Neraca perdagangan menggambarkan kondisi perdagangan suatu negara yang dilihat dari perbandingan antara besarnya ekspor dengan impor. Pada Gambar 4.1.5. dapat diamati bahwa pada periode 2011 hingga 2015, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Pada tahun 2011 Indonesia mengalami surplus sebesar 26,1 Milliar Dollar AS dan 7,3 Milliar Dollar AS pada tahun 2015.

Ekspor dari Indonesia adalah dalam bentuk bahan mentah dan energi, maka tujuan negara ekspor tidak banyak. Disisi lain, barang yang diimpor ke Indonesia adalah dalam bentuk barang jadi,

yang sudah barang tentu nilainya lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Sebagai contoh pada tahun 2014 ada peningkatan pada impor non migas yakni sisa industri makanan sebesar 7,62%, plastik dan barang dari palstik sebesar 1,99%, dan bahan kimia organik sebesar 0,96%. Hal inilah yang menyebabkan nilai ekspor akan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai impor

Gambar 4.1.5. Neraca Perdagangan



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

Jika diamati, baik ekspor dan impor, keduanya mengalami penurunan pada periode 2011 hingga 2015. Pertumbuhan, baik ekspor maupun impor, dari tahun ke tahun tidak semakin meningkat, namun semakin menurun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor,

pertama, masih rentannya fundamental ekonomi Indonesia terhadap kondisi ekonomi global. Kedua, kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah terhadap infrastruktur pendukung industri didalam negeri, sehingga menimbulkan biaya tinggi dalam proses mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.

4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjadi salah satu indikator sosial yang penting karena, pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Gambar 4.1.6. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia



Sumber: Statistik Indonesia 2016, diolah (2017)

Data IPM Indonesia pada Gambar 4.1.6. menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada periode waktu 2011 hingga 2015. Pada tahun 2011, IPM Indonesia sebesar 67,1, meningkat pada tahun 2012 menjadi 67,7. Begitu pula pada tahun 2013 IPM Indonesia kembali naik hingga sebesar 68,3, dan mencapai 68,9 pada tahun 2014. Data terakhir pada tahun 2015 menunjukkan IPM Indonesia mencapai indeks sebesar 69,6. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia pada periode 2011-2015 cukup baik. Indonesia mampu meningkatkan PDB, menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan neraca perdagangan, dan meningkatkan IPM. Namun demikian, perekonomian Indonesia pada periode tersebut masih menghadapi persoalan-persoalan, seperti fluktuasi tingkat inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan penurunan volume perdagangan.

4.2. Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah

4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada kurun waktu satu tahun. Kenaikan pada PDRB dapat menggambarkan kinerja suatu daerah.

Pada Gambar 4.2.1.dapat terlihat bagaimana PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2012 hingga 2015. Pada tahun 2013 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 5,11% dari tahun 2012. Begitu pula pada tahun 2014, kembali naik sebesar 5,28% dan 5,44% pada tahun 2015. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia, Provinsi

Jawa Tengah pada periode waktu yang sama memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Gambar 4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah) Menurut Harga Konstan 2010 Periode 2012-2015

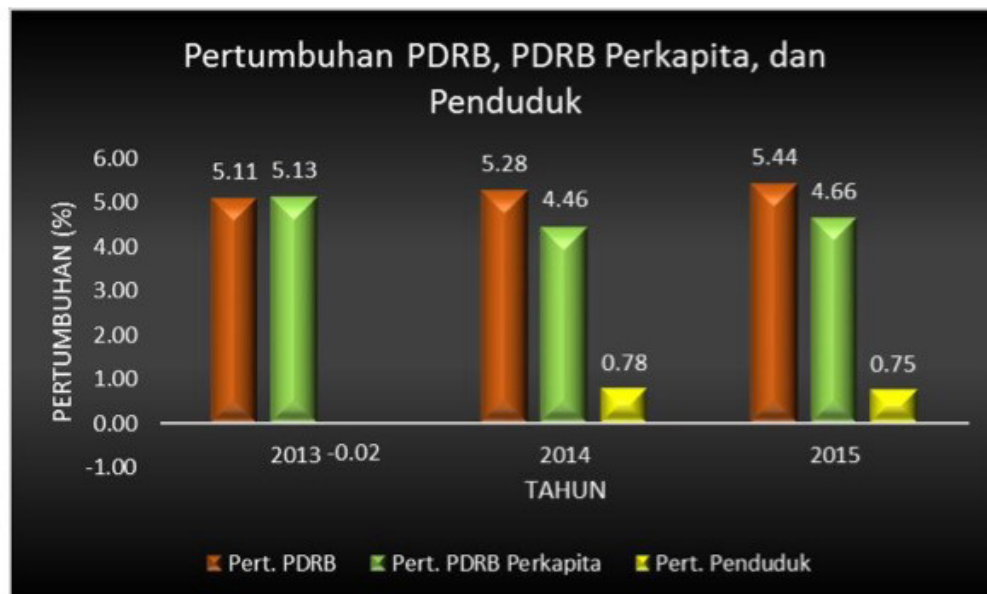


Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

Namun jika memperhatikan Gambar 4.2.2., maka terlihat bahwa PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang semakin kecil dari tahun 2013 hingga 2015. Pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 5,13% pada tahun 2013, tidak diikuti pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih baik pada tahun 2014, yakni turun dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,46%. Begitu

pula pada tahun 2015, pertumbuhan PDRB Perkapita sedikit lebih baik dari tahun 2014, yakni sebesar 4,66%.

Gambar 4.2.2. Pertumbuhan PDB, PDRB Perkapita, Penduduk Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

4.2.2. Inflasi

Inflasi tidak dihitung pada tingkat nasional saja, namun juga dihitung pada tingkat provinsi. Pola yang menarik ditemukan pada data inflasi di Provinsi Jawa Tengah, dimana pola perubahan inflasi pada umumnya sama dengan pola inflasi di tingkat nasional. Inflasi tertinggi pada periode 2012 hingga 2015 terjadi pada tahun 2013 dan

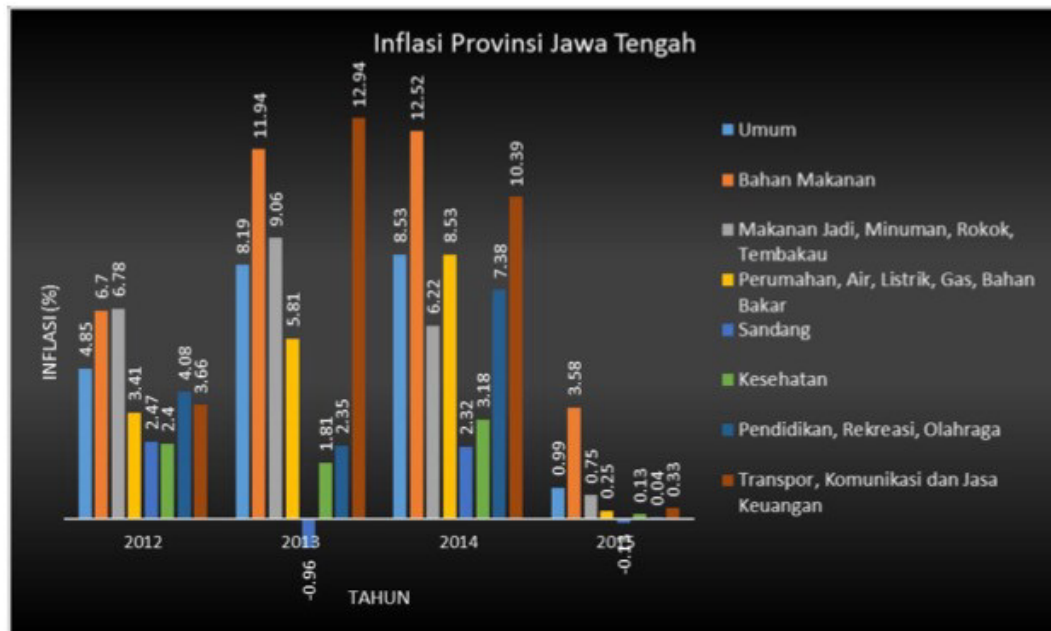
2014, hal ini sama dengan pola inflasi Indonesia pada periode yang sama.

Inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 8,19% dan kontribusi yang menonjol terlihat pada kelompok bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Komoditas yang memberikan sumbangan terhadap naiknya inflasi di Provinsi Jawa Tengah adalah dari telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, kue kering berminyak dan tomat sayur. Pada tahun 2014, inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, yakni sebesar 8,53%, dan kedua kelompok yang sama, yakni kelompok bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan masih memberikan kontribusi yang besar atas tingginya inflasi pada tahun tersebut. Faktor yang mempengaruhi naiknya inflasi pada tahun 2013 dan 2014 adalah adanya penyesuaian harga oleh pemerintah pada tarif tenaga listrik, harga elpiji 12 kg, dan harga premium dan solar.

Berkenaan dengan fenomena inflasi pada tahun 2013 dan 2014, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengupayakan peningkatan koordinasi dan memperkuat kerja sama antar daerah dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan bahan pangan strategis. Di sektor moneter, upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) adalah menjaga

kebijakan BI *rate*, menjaga kebijakan moneter, dan memberikan himbauan kepada bank umum agar suku bunga kredit tidak terlalu tinggi. Pola fluktuasi inflasi yang sama pada Provinsi Jawa Tengah dengan Indonesia menunjukkan korelasi yang kuat antara keduanya.

Gambar 4.2.3. Inflasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

4.2.3. Keuangan Daerah

Salah satu indikator yang juga dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan pemangku kepentingan pada tingkat daerah adalah keuangan daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Gambar 4.2.4. menunjukkan bagaimana PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada periode waktu 2012 hingga 2015. Walaupun jika dihitung, besarnya kenaikan PAD mengalami penurunan. Pada tahun 2013, kenaikan PAD sebesar 19,28%, tahun 2014 sebesar 17,18% dan 15,22% pada tahun 2015.

Gambar 4.2.4. Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2015 (miliar rupiah)



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

Berbeda dengan PAD, perubahan dana perimbangan untuk Provinsi Jawa Tengah, tidak mengalami fluktuasi yang berarti. Hal ini terlihat dari besarnya peningkatan Dana Perimbangan Provinsi Jawa

Tengah sebesar 6,04% pada tahun 2013, 2,94% pada tahun 2014 dan 5,63% pada tahun 2015.

Data PAD dan dana perimbangan Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sedang menuju kearah kemandirian. Hal ini bisa diamati dengan meningkatnya PAD Provinsi Jawa Tengah sedangkan Dana Perimbangan tidak banyak mengalami perubahan.

4.2.4. Neraca Perdagangan

Gambar 4.2.5. secara jelas menggambarkan nilai impor yang lebih besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan nilai ekspor mengakibatkan neraca perdagangan Provinsi Jawa Tengah terus mengalami defisit. Defisit neraca perdagangan ini terus meningkat, pada tahun 2011 sebesar 8.335,6 Juta Rupiah, 9.384,5 Juta Rupiah pada tahun 2012, kemudian meningkat menjadi 10.449,4 Juta Rupiah pada tahun 2013. Kondisi ini bertahan hingga tahun 2014, saat neraca perdagangan Provinsi Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 10.167 Juta Rupiah. Namun pada tahun 2015, kondisinya sedikit lebih baik, karena defisit neraca perdagangan menjadi sebesar 5.364,2 Juta Rupiah.

**Gambar 4.2.5. Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Periode 2011-2015 (Juta Rupiah)**



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

Jika dibandingkan dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia, maka neraca perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak kesamaan. Nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor ditemukan pada dua kelompok data yang ada, baik di Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah.

4.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karenanya

penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan besaran IPM daerahnya masing-masing.

Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi dalam menghitung IPM. Alasan perubahan metodologi, pertama beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Demikian juga dengan PDB Perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa menunjukkan IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada periode 2011 hingga 2015.

Gambar 4.2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011-2016

Dalam laman BPS, dapat diketahui bahwa metode baru perhitungan IPM memiliki beberapa keunggulan diantaranya, metode ini menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Sebagai contoh dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Data PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Keunggulan lainnya adalah penggunaan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk

mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Data IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Jawa Tengah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Kondisi IPM di Provinsi Jawa Tengah, jika dibandingkan dengan IPM Indonesia memiliki pola yang sama, meningkat dari tahun ke tahun, pada periode 2011 hingga 2015.

Secara umum, pada periode 2011-2015 perekonomian Jawa Tengah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Jawa Tengah pada periode tersebut mampu meningkatkan PDRB, pertumbuhan PDRB, PAD, neraca perdagangan, dan IPM. Namun demikian, Jawa Tengah masih perlu untuk dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi dan masih perlu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan.

4.3. Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang

4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata, besarnya PDRB ADHB per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah Rp.

5.933.453.000.000. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Kota Magelang.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, nilai PDRB ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah yang terendah. Demikian pula apabila dihitung secara rata-rata, besarnya PDRB ADHB per tahun Kota Magelang adalah 0,64% dari rata-rata PDRB ADHB per tahun Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa per tahun secara relatif Kota Magelang menunjukkan sumber daya ekonomi yang relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.

Tabel 4.3.1. PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016 (ADHB Dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDB ADHB Indonesia (a)	PDRB ADHB						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	8.615.704.500	754.529.436	4.888.146	6.095.754	11.841.495	10.899.446	15.126.969	17.738.492
2013	9.546.134.000	830.016.016	5.356.943	6.597.802	13.088.402	11.749.524	16.526.133	19.602.845
2014	10.569.705.300	922.471.181	5.926.218	7.899.115	14.592.453	13.001.090	18.645.422	21.923.411
2015	11.531.716.900	1.011.850.969	6.480.579	8.686.465	16.107.062	14.150.510	20.762.286	24.131.644
2016	12.406.809.800	1.092.030.920	7.015.380	9.829.693	17.526.473	15.365.352	22.315.249	26.223.220
<i>Rata-rata</i>	10.534.014.100	922.179.705	5.933.453	7.821.766	14.631.177	13.033.184	18.675.212	21.923.922
<i>Rata2 Rasio terhadap (a)</i>	100%	8,75%	0,06%	0,07%	0,14%	0,12%	0,18%	0,21%
<i>Rata2 Rasio terhadap (b)</i>	1.143%	100%	0,64%	0,84%	1,58%	1,42%	2,02%	2,38%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, Diolah Peneliti.

PDRB ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan standar hidup (*standard of living*) Kota Magelang dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Atau dengan kata lain, Kota Magelang mampu meningkatkan kuantitas atau tingkat produksi barang dan jasa dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Secara rata-rata, besarnya PDRB ADHK per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah Rp. 4.999.500.000.000.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, nilai PDRB ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah yang terendah. Demikian pula apabila dihitung secara rata-rata, besarnya PDRB ADHKper tahun Kota Magelang adalah 0,65% dari PDRB ADHKper tahun Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa per tahun secara relatif Kota Magelang menunjukkan kemampuan menghasilkan kuantitas barang dan jasa yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.

**Tabel 4.3.2. PDB Indonesia dan PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota
Magelang dan Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016
(ADHK Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	PDB ADHK Indonesia (a)	PDRB ADHK						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	7.727.083.400	691.343.116	4.484.268	5.390.337	10.740.983	9.935.905	13.707.057	16.071.143
2013	8.156.497.800	726.655.118	4.755.092	6.040.773	11.299.343	10.333.757	14.333.334	17.020.756
2014	8.564.866.600	764.959.151	4.992.113	6.436.100	11.867.680	10.828.169	15.163.092	17.936.288
2015	8.982.511.300	806.775.362	5.247.341	7.299.736	12.486.495	11.353.870	16.115.554	18.838.352
2016	9.433.034.400	849.383.565	5.518.685	7.838.164	13.110.796	11.949.926	16.916.220	19.855.844
<i>Rata-rata Rasio terhadap (a)</i>	100%	8,95%	0,06%	0,08%	0,14%	0,13%	0,18%	0,21%
<i>Rata-rata Rasio terhadap (b)</i>	1.117%	100%	0,65%	0,86%	1,55%	1,42%	1,99%	2,34%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, (diolah).

4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata, besarnya PDRB per kapita ADHB per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah Rp. 49.280.206. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi per kapita per tahun yang dihasilkan oleh Kota Magelang.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, nilai PDRB per kapita ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah yang tertinggi. Demikian pula apabila dihitung secara rata-rata, besarnya PDRB per kapita ADHB per tahun Kota Magelang adalah 109% terhadap PDB per kapita ADHB per tahun Indonesia dan 179% terhadap PDRB per kapita ADHB per tahun Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif per tahun Kota Magelang menunjukkan sumber daya ekonomi per kapita yang relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan ini juga berlaku apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.

Tabel 4.3.3. PDB Indonesia dan PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016 (ADHB dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDB Per Kapita Indonesia (a)	PDRB Per Kapita						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	37.458.116	22.865.435	40.933.765	8.675.032	16.340.128	14.245.538	12.906.992	14.666.141
2013	42.305.686	24.952.127	44.686.250	9.351.594	17.882.114	15.271.101	14.045.405	16.045.902
2014	45.951.251	27.517.837	49.205.553	11.156.848	19.749.396	16.810.501	15.789.243	17.770.441
2015	48.721.367	29.959.340	53.650.729	12.227.810	21.596.302	18.208.865	17.522.661	19.375.128
2016	51.840.452	32.100.528	57.924.731	13.792.460	23.291.427	19.679.162	18.774.350	20.859.709
Rata2 Rasio terhadap (a)	100%	61%	109%	24%	44%	37%	35%	39%
Rata2 Rasio terhadap (b)	165%	100%	179%	40%	72%	61%	58%	65%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, Diolah Peneliti.

PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. PDRB riil per kapita tersebut dapat mewakili tingkat pendapatan rata-rata Kota Magelang, dimana peningkatan PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang menunjukkan peningkatan pendapatan dan konsumsi per kapita Kota Magelang. Secara rata-rata, besarnya PDRB riil per kapita ADHK per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah Rp. 41.534.997.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, nilai PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah yang tertinggi. Demikian pula apabila dihitung secara rata-rata, besarnya PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang adalah 113% PDB riil per kapita Indonesia dan 181% PDRB riil per kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif Kota Magelang menunjukkan kemampuan meningkatkan tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu lainnya.

**Tabel 4.3.4. Produk Domestik Bruto Per Kapita Indonesia dan
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Provinsi Jawa Tengah,
Kota Magelang dan Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016
(ADHK)**

Tahun	PDB Per Kapita Indonesia (a)	PDRB Per Kapita						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	33.253.434	20.950.622	37.551.652	7.671.134	14.821.527	12.986.193	11.695.461	13.287.580
2013	35.952.192	21.844.869	39.665.765	8.562.072	15.437.800	13.430.999	12.181.766	13.932.333
2014	37.110.378	22.819.164	41.449.649	9.090.460	16.061.693	14.000.898	12.840.350	14.538.602
2015	38.139.331	23.887.369	43.441.132	10.275.732	16.741.856	14.610.151	13.600.978	15.125.181
2016	39.253.708	24.967.847	45.566.786	10.998.060	17.423.308	15.304.858	14.232.018	15.794.671
Rata-rata Rasio terhadap (a)	100%	62%	113%	25%	44%	38%	35%	40%
Rata-rata Rasio terhadap (b)	160%	100%	181%	41%	70%	61%	56%	63%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, Diolah Peneliti.

4.3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB. Pada periode waktu tersebut pertumbuhan PDRB Kota Magelang tercatat tertinggi pada tahun 2013, yakni 6,04%. Yang terendah adalah 4,98% dicapai pada tahun 2014. Pertumbuhan PDRB Kota Magelang yang terjadi pada periode 2012-2016 menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik pada periode tersebut di Kota Magelang.

Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB Kota Magelang pada periode 2012-2016 dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini mengingat pada periode tersebut rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Magelang lebih tinggi dari rata-rata PDB Indonesia (5,30%), Provinsi Jawa Tengah (5,29%) dan Eks Karesidenan Kedu lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik Kota Magelang pada periode 2012-2016 lebih tinggi dari wilayah-wilayah pembanding tersebut.

Tabel 4.3.5. Pertumbuhan (%) PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016, (ADHK)

Tahun	Pertumbuhan PDB Indonesia (a)	Pertumbuhan PDRB						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	6,03	5,34	5,37	4,54	4,27	4,70	4,88	4,88
2013	5,56	5,11	6,04	5,05	5,20	4,00	4,57	5,91
2014	5,01	5,27	4,98	8,61	5,03	4,78	5,79	5,38
2015	4,88	5,47	5,11	-1,45	5,21	4,85	6,28	5,03
2016	5,02	5,28	5,17	3,51	5,00	5,25	4,97	5,40
<i>Rata-rata</i>	<i>5,30</i>	<i>5,29</i>	<i>5,33</i>	<i>4,05</i>	<i>4,94</i>	<i>4,72</i>	<i>5,30</i>	<i>5,32</i>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, (Diolah)

4.3.4. Laju Implisit PDRB

Secara umum, pada periode 2012-2016 laju implisit PDRB Kota Magelang menunjukkan tren yang menurun meskipun sempat

menaik pada periode 2014-2015. Secara rata-rata, laju implisit PDRB Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah 3,92%. Laju ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju implisit PDB Indonesia (4,03%), laju implisit PDRB Provinsi Jawa Tengah (4%) dan laju implisit PDRB Eks Karesidenan Kedu lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan pada laju implisit PDRB Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah relatif rendah.

Laju implisit PDRB mencerminkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Secara teoritis, laju implisit PDRB di bawah 10% dikatakan rendah. Dengan angka laju implisit PDRB Kota Magelang sebesar 3,92% pada periode 2012-2016 mencerminkan bahwa tingkat perkembangan harga di tingkat produsen di Kota Magelang relatif rendah. Atau dengan kata lain, tingkat perkembangan harga di tingkat produsen di Kota Magelang masih relatif stabil. Perkembangan harga yang demikian dapat memberikan iklim ekonomi yang aman dan kondusif bagi semua pelaku ekonomi di Kota Magelang.

Tabel 4.3.6. Laju Implisit PDB Indonesia, PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan PDRB Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016 (%)

Tahun	Laju Implisit PDB Indonesia (a)	Laju Implisit PDRB						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	3,75	3,42	3,91	6	4,48	3,63	4,77	4,53
2013	4,97	4,66	3,35	8,54	5,07	3,65	4,48	4,34
2014	5,44	5,57	5,37	6,43	6,15	5,60	6,65	6,13
2015	4,03	4,00	4,04	7,14	4,91	3,80	4,77	4,80
2016	2,45	2,51	2,93	1,74	3,63	3,17	2,39	3,10
<i>Rata-rata</i>	<i>4,13</i>	<i>4,03</i>	<i>3,92</i>	<i>5,97</i>	<i>4,85</i>	<i>3,97</i>	<i>4,61</i>	<i>4,58</i>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, (Diolah)

4.3.5. Pertumbuhan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan pertumbuhan. Secara rata-rata, besarnya pertumbuhan PDRB per kapita ADHB per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah 9,08%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi per kapita per tahun yang dihasilkan oleh Kota Magelang.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, secara rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah relatif lebih tinggi. Angka 9,08% hanya lebih rendah dari Kabupaten Purworejo (11,72%). Demikian pula

apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB per kapita ADHB Indonesia dan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Provinsi Jawa Tengah, maka pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Magelang adalah lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif per tahun Kota Magelang menunjukkan peningkatan sumber daya ekonomi per kapita yang relatif lebih besar apabila dibandingkan peningkatan yang dialami Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, bahkan mayoritas Eks Karesidenan Kedu lainnya.

Tabel 4.3.7. Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan PDRB Per Kapita Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016 (ADHB)

Tahun	Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia (a)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	8,64%	8,05%	9,11%	9,09%	7,84%	-0,29%	9,42%	8,49%
2013	12,94%	9,13%	9,17%	7,80%	9,44%	7,20%	8,82%	9,41%
2014	8,62%	10,28%	10,11%	19,30%	10,44%	10,08%	12,42%	10,75%
2015	6,03%	8,87%	9,03%	9,60%	9,35%	8,32%	10,98%	9,03%
2016	6,40%	7,15%	7,97%	12,80%	7,85%	8,07%	7,14%	7,66%
Rata-rata	8,52%	8,69%	9,08%	11,72%	8,98%	6,68%	9,75%	9,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, (Diolah)

PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan PDRB riil per kapita ADHK tersebut dapat mewakili pertumbuhan tingkat

pendapatan rata-rata Kota Magelang, dimana pertumbuhan PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang menunjukkan terjadinya pertumbuhan pendapatan dan konsumsi per kapita Kota Magelang. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB riil per kapita ADHK per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah 4,97%.

Dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya, secara rata-rata pertumbuhan PDRB riil per kapita ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah yang kedua tertinggi setelah Kabupaten Purworejo (9,23%). Demikian pula apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB riil per kapita Indonesia (4,21%) dan pertumbuhan PDRB riil per kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah (4,48%). Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif Kota Magelang menunjukkan kemampuan meningkatkan pertumbuhan tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan mayoritas Eks Karesidenan Kedu lainnya.

Tabel 4.3.8. Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia, PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan PDRB Per Kapita Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016 (ADHK)

Tahun	Pertumbuhan PDB Per Kapita Indonesia (a)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita						
		Jawa Tengah (b)	Kota Magelang (c)	Kabupaten Purworejo (d)	Kabupaten Temanggung (e)	Kabupaten Wonosobo (f)	Kabupaten Kebumen (g)	Kabupaten Magelang (h)
2012	4,03%	4,47%	5,01%	8,28%	3,22%	-4,09%	4,43%	3,79%
2013	8,12%	4,27%	5,63%	11,61%	4,16%	3,43%	4,16%	4,85%
2014	3,22%	4,46%	4,50%	6,17%	4,04%	4,24%	5,41%	4,35%
2015	2,77%	4,68%	4,80%	13,04%	4,23%	4,35%	5,92%	4,03%
2016	2,92%	4,52%	4,89%	7,03%	4,07%	4,75%	4,64%	4,43%
Rata-rata	4,21%	4,48%	4,97%	9,23%	3,94%	2,54%	4,91%	4,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016, (Diolah)

4.3.6. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Andalan dan Unggulan) dan Pengeluaran

PDRB Kota Magelang dapat dianalisis berdasarkan pada lapangan usaha dan pengeluaran. Berdasarkan lapangan usaha, Kota Magelang diketahui memiliki sektor andalan (lapangan usaha di Kota Magelang yang pada saat ini mendominasi dan di masa mendatang mendominasi struktur perekonomian Kota Magelang jika dibandingkan dengan lapangan usaha-lapangan usaha yang lainnya di Kota Magelang) dan sektor unggulan (lapangan usaha di Kota Magelang yang saat ini menang bersaing dan di masa mendatang

menang bersaing dengan lapangan usaha yang sama di tingkat Jawa Tengah). Bagian ini selanjutnya menjelaskan kedua sektor tersebut.

4.3.6.1. Sektor Andalan

Berdasarkan pada perkembangan lapangan usaha di Kota Magelang untuk periode 2012-2016, maka dapat diketahui sektor andalan Kota Magelang. Sektor andalan Kota Magelang tersebut terdiri dari 4 (empat) lapangan usaha, yakni: Industri Pengolahan², Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Pendidikan³. Keempat lapangan usaha tersebut memiliki pangsa pasar dan laju pertumbuhan yang rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapangan usaha-lapangan usaha yang lainnya di Kota Magelang. Khusus bagi lapangan usaha Informasi dan Komunikasi Kota Magelang, prediksi ini sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro nasional, yakni menjadikan teknologi

²Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Contoh industri pengolahan di Kota Magelang adalah pengrajin fiber glass, handicraft hasil limbah, crist craft, kerang craft, sarung tenun Golib, kerajinan topeng, dan Sabila handicraft. Contoh-contohnya lainnya dapat dilihat di <http://www.magelangkota.go.id/direktori/kategori/fasilitas-kota/umkm>.

³Jasa Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya. Contohnya adalah pelayanan yang diberikan oleh sekolah-sekolah maupun universitas/ perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang.

informasi dan komunikasi sebagai salah satu lapangan usaha unggulan dalam era MEA.

Sementara itu bagi lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Kota Magelang, prediksi lapangan usaha tersebut sebagai sektor andalan adalah sebuah kesempatan yang besar untuk terus berkembang oleh karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan lapangan usaha pariwisata dan perdagangan sebagai lapangan unggulan Jawa Tengah. Lapangan usaha Transportasi Kota Magelang dalam hal ini dapat berperan sebagai penyedia sarana transportasi menuju ke obyek-obyek wisata di Jawa Tengah yang menjadikan Kota Magelang sebagai jalur perlintasan, sedangkan lapangan usaha Pergudangan Kota Magelang dapat berperan dalam penyimpanan produk atau komoditas yang diperdagangkan yang menjadikan Kota Magelang sebagai tempat transit perdagangan antar daerah di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan perkembangan infrastruktur jalan tol dan perkembangan aktivitas ekonomi di Kawasan Strategis Nasional(KSN) Kedungsepur. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan diprediksi akan berkembang oleh karena secara nasional lapangan usaha Industri Pengolahan adalah salah satu lapangan usaha yang memiliki sumbangan terbesar terhadap PDB Indonesia. Menurut BPS pada tahun 2016 lapangan

usaha Industri Pengolahan Indonesia menyumbang sebesar 20,51 persen terhadap PDB Indonesia, atau tumbuh 4,29 persen.

Tabel 4.3.9.Sektor Andalan Kota Magelang Periode 2012-2016

Kriteria	IPPS < 1	IPPS ≥ 1
IDS < 1	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (IDS: 0,33; IPPS: 0,06) - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (IDS: 0,02; IPPS: 0,04) - Pengadaan Listrik dan Gas (IDS: 0,06; IPPS: 0,64)	- Real Estat (IDS: 0,61; IPPS: 1,70) - Jasa Perusahaan (IDS: 0,06; IPPS: 4,38) - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (IDS: 0,45; IPPS: 3,11) - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (IDS: 0,98; IPPS: 1,46) - Jasa Keuangan dan Asuransi (IDS: 0,84; IPPS: 1,78) - Jasa Lainnya (IDS: 0,35; IPPS: 1,45)

Kriteria	IPPS < 1	IPPS ≥ 1
IDS ≥ 1	- Konstruksi (IDS: 2,80; IPPS: 0,25) - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (IDS: 2,60; IPPS: 0,29) - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (IDS: 1,89; IPPS: 0,16)	<u>Sektor Andalan:</u> - Industri Pengolahan (IDS: 2,55; IPPS: 1,32) - Transportasi dan Pergudangan (IDS: 1,29; IPPS: 3,40) - Informasi dan Komunikasi (IDS: 1,07; IPPS: 9,99) - Jasa Pendidikan (IDS: 1,11; IPPS: 7,31)

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang dan Kota Magelang Dalam Angka (diolah)

4.3.6.2. Sektor Unggulan

Selain memiliki sektor andalan, Kota Magelang juga memiliki sektor unggulan. Pada periode 2012-2016 Kota Magelang memiliki 3 (tiga) sektor unggulan. Namun demikian, yang disayangkan adalah bahwa dua lapangan usaha di Kota Magelang yang merupakan sektor andalan, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, bukanlah merupakan sektor unggulan tersebut. Lapangan usaha Industri Pengolahan di Kota Magelang tidak menjadi sektor unggulan karena memiliki aktivitas

ekonomi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan lapangan usaha Industri Pengolahan lainnya di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk mendukung aktivitas ekonomi pada lapangan usaha Industri Pengolahan di Kota Magelang.

Demikian pula dengan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang bukan merupakan sektor unggulan. Hal ini dapat terjadi karena lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan kota Magelang terkait erat dengan lapangan usaha Industri Pengolahan Kota Magelang. Dari hasil survei bidang usaha perusahaan angkutan barang, hanya 10 persen pengangkutan barang yang berasal dari bidang usaha industri (Prasetyo dan Anwar, 2015). Yang lain berasal dari perdagangan (19%), peternakan (10%), pertanian (10%), ekspedisi barang (19%), pasir (16%), perkebunan (6%), dan lainnya (10%) (Prasetyo dan Anwar, 2015). Komposisi bidang usaha pengangkutan tersebut, khususnya industri, berimplikasi pada permintaan transportasi (Prasetyo dan Anwar, 2015) dan pergudangan yang tidak terlalu tinggi.

Sektor unggulan Kota Magelang adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Lapangan usaha-lapangan usaha yang menjadi unggulan tersebut mampu bersaing dan

menang jika ditandingkan dengan lapangan usaha yang sama di Jawa Tengah. Selain sebagai sektor andalan Kota Magelang, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan Jasa Pendidikan menjadi sektor unggulan Kota Magelang untuk periode 2012-2016. Hal ini menegaskan bahwa Kota Magelang mendapatkan peluang yang besar dalam mengembangkan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan Jasa Pendidikan oleh karena KSN Kedungsepur memerlukan dukungan informasi, dan komunikasi, dan jasa pendidikan dari daerah-daerah sekitar, khususnya Kota Magelang. Kota Magelang menjadi penting karena merupakan penghubung antara KSN Kedungsepur dan segitiga emas Solo-Semarang-Yogyakarta.

Sementara itu, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga menjadi sektor unggulan Kota Magelang. Lapangan usaha ini mencakup (1) kegiatan yang bersifat pemerintahan dan umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan;(2) perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah; dan(3) kegiatan jaminan sosial wajib.

Tabel 4.3.10. Sektor Unggulan Kota Magelang Periode 2012-2016

Kriteria	DLQ< 1	DLQ≥ 1
SLQ< 1	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SLQ: 0,14; DLQ: 0,86) - Pengadaan Listrik dan Gas (SLQ: 3,08; DLQ: 0,37) - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (SLQ: 2,05; DLQ: 0,98) - Jasa Perusahaan (SLQ: 0,99; DLQ: 0,50)	- Industri Pengolahan (SLQ: 0,43; DLQ: 1,35)
SLQ≥ 1	- Konstruksi (SLQ: 1,61; DLQ: 0,22) - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (SLQ: 1,07; DLQ: 0,45) - Transportasi dan Pergudangan (SLQ: 2,25; DLQ: 0,72) - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SLQ: 1,83; DLQ: 0,79) - Jasa Keuangan dan Asuransi (SLQ: 1,77; DLQ: 0,92)	<u>Sektor Unggulan:</u> - Informasi dan Komunikasi (SLQ: 1,49; DLQ: 1,19) - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (SLQ: 4,17; DLQ: 1,21)

Kriteria	DLQ< 1	DLQ≥ 1
	- Real Estat (SLQ: 1,91; DLQ: 0,55) - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (SLQ: 3,21; DLQ: 0,54) - Jasa Lainnya (SLQ: 1,31; DLQ: 0,46)	- Jasa Pendidikan (SLQ: 1,76; DLQ: 1,39)

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang dan Kota Magelang Dalam Angka (diolah)

4.3.6.3. PDRB Kota Magelang dari Sisi Pengeluaran

Selanjutnya, PDRB Kota Magelang juga dapat dianalisis berdasarkan pada sisi pengeluaran. Berikut ini disajikan data distribusi komponen pengeluaran pada PDRB Kota Magelang pada periode 2012-2016.

Tabel 4.3.11. Distribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDRB ADHB Kota Magelang Periode 2012-2016

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	58,36%	59,55%	58,73%	58,04%	57,26%
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15%	1,22%	1,28%	1,31%	1,28%
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,15%	19,6%	19,59%	20,53%	20,4%
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,59%	48,24%	48,85%	50,15%	49,32%
5. Perubahan Inventori	5,81%	4,8%	3,51%	3,37%	2,18%
6. Ekspor Barang dan Jasa	47,76%	48,36%	48,42%	50,02%	50,78%
7. Impor Barang dan Jasa	82,82%	81,79%	80,39%	83,41%	81,23%
Produk Domestik Regional Bruto	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara berturut-turut pengeluaran di Kota Magelang dipenuhi oleh impor barang dan jasa, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, pengeluaran konsumsi pemerintah, perubahan inventori, dan pengeluaran konsumsi LNPR. Distribusi impor Kota Magelang yang relatif besar dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya dapat terjadi mengingat berdasarkan kondisi eksisting, ketersediaan barang dan jasa terutama untuk bahan pokok dan bahan penting lainnya, ketersediaannya tercukupi meskipun Kota Magelang bukan wilayah penghasil. Hal ini karena Kota Magelang merupakan wilayah pemasaran bagi wilayah-wilayah sekitarnya di Eks Karesidenan Kedu.

Lebih lanjut, salah satu tujuan perekonomian adalah mencapai keseimbangan eksternal, yakni tercapainya keseimbangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor yang seimbang mencerminkan bahwa kebutuhan membeli barang dan jasa dari perekonomian lain sebagai akibat perekonomian domestik tidak dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, dapat dibiayai oleh hasil penjualan barang dan jasa ke perekonomian lain. Ekspor dan impor yang seimbang juga memberi pengertian bahwa satu perekonomian mampu mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi dari dalam perekonomiannya sendiri. Mengingat

bahwa pada periode 2012-2016 pengeluaran impor barang dan jasa Kota Magelang lebih tinggi dari ekspor barang dan jasa Kota Magelang, maka perekonomian Kota Magelang memerlukan pasokan dana yang cukup untuk para pelaku ekonomi di Kota Magelang.

4.3.7. Upah Minimum Kota

Upah minimum Kota Magelang pada periode 2012-2016 menunjukkan tren yang meningkat. Secara umum, pada periode tersebut per tahunnya upah minimum Kota Magelang meningkat 12,56%. Dilihat berdasarkan nilai nominalnya, di Eks Karesidenan Kedu, upah minimum Kota Magelang per tahunnya adalah yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Magelang. Namun demikian, persentase kenaikan upah minimum Kota Magelang per tahunnya termasuk yang terendah diantara wilayah-wilayah Eks Karesidenan Kedu. Mengingat penentuan upah minimum pada dasarnya berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), maka hal ini menunjukkan bahwa harga-harga kebutuhan hidup layak di Kota Magelang termasuk yang tertinggi di Eks Karesidenan Kedu, namun kenaikan harga-harga KHL di Kota Magelang tergolong yang terendah di Eks Karesidenan Kedu.

**Tabel 4.3.12. Upah Minimum di Kota Magelang dan Eks Karesidenan
Kedu Periode 2012-2016**

	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kota Magelang	837.000	901.500	1.037.000	1.211.000	1.341.000	1.065.500
% Kenaikan		7.71	15.03	16.78	10.73	12.56
Kabupaten Purworejo	809.000	849.000	910.000	1.165.000	1.300.000	1.006.600
% Kenaikan		4.94	7.18	28.02	11.59	12.93
Kabupaten Temanggung	866.000	940.000	1.050.000	1.178.000	1.313.000	1.069.400
% Kenaikan		8.55	11.70	12.19	11.46	10.97
Kabupaten Wonosobo	825.000	880.000	990.000	1.166.000	1.326.000	1.037.400
% Kenaikan		6.67	12.50	17.78	13.72	12.67
Kabupaten Kebumen	770.000	835.000	975.000	1.157.000	1.324.000	1.012.200
% Kenaikan		8.44	16.77	18.67	14.43	14.58
Kabupaten Magelang	870.000	942.000	1.152.000	1.255.000	1.410.000	1.125.800
% Kenaikan		8.28	22.29	8.94	12.35	12.97

Sumber: <http://www.jateng.tribunnews.com/>; <http://www.lokersemarang.com/>; <http://www.solopos.com/>;

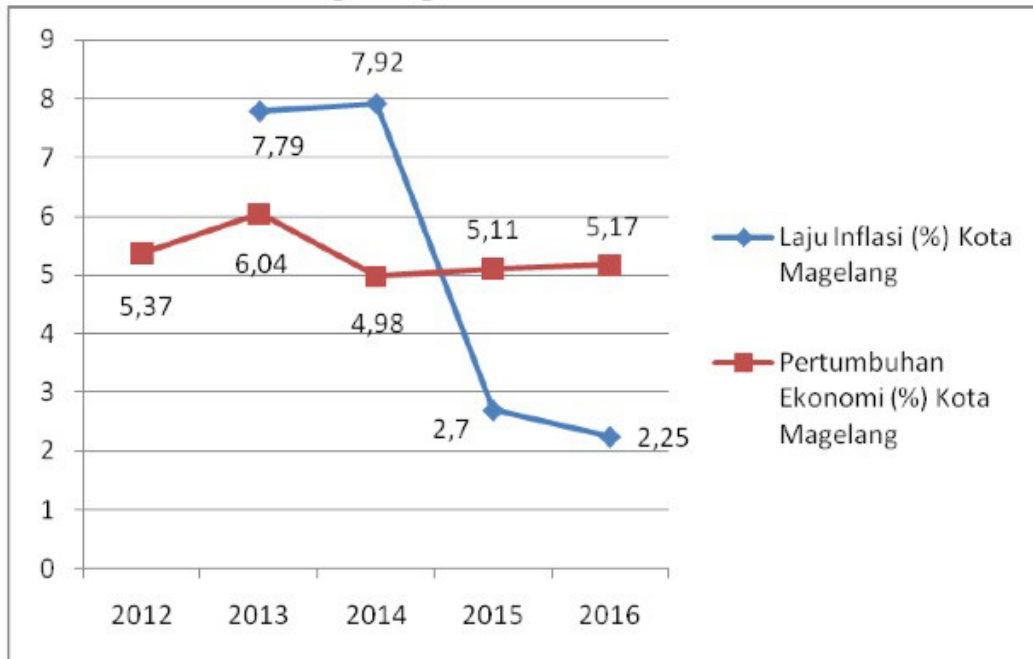
4.3.8. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi⁴. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan

⁴Tinjauan secara teoritis dapat dilihat dari buku berjudul "Inflation Targeting" (terbit tahun 1999 oleh Princeton University Press) yang ditulis oleh Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, dan Adam S. Posen. Sementara untuk tinjauan empirik dapat dilihat pada hasil penelitian Pratomo dan Kalirajan (2011).

sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Gambar 4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kota Magelang, Periode 2012-2016



Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai Tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2017. (diolah)

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa prediksi secara teoritis yang menyatakan bahwa tingkat inflasi satu digit mendorong pertumbuhan ekonomi adalah terbukti. Pada periode 2012-2016 dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar 5,17%, Kota Magelang secara rata-rata mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33%. Selanjutnya, mengingat bahwa pergerakan tingkat

inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada periode 2012-2016 adalah bersifat berkebalikan (jika yang satu meningkat maka yang lain menurun), maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas di sisi permintaan Kota Magelang dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan aktivitas di sisi penawaran. Itu artinya, aktivitas perekonomian Kota Magelang pada periode 2012-2016 lebih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (58,39% [adhb]) dibandingkan dengan aktivitas produksi barang dan jasa final (PMTB: 49,43% [adhb]).

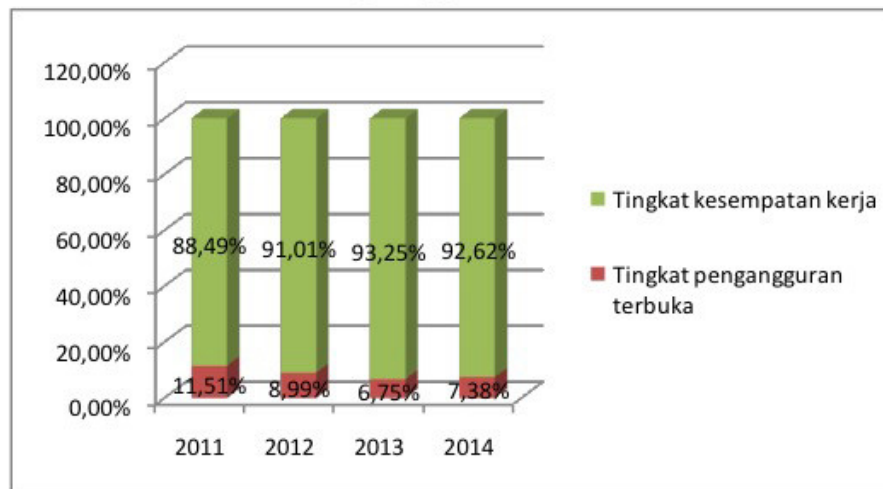
4.3.9. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Secara teoritis, pasar tenaga kerja akan berada dalam kondisi keseimbangan (penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja) jangka panjang apabila tingkat pengangguran konstan. Dalam kondisi keseimbangan jangka panjang tersebut jumlah orang yang kehilangan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaannya akan sama dengan jumlah orang menganggur yang mendapatkan pekerjaan. Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, bisa saja terjadi pengangguran. Pengangguran tersebut adalah kombinasi antara pengangguran friksional dan pengangguran struktural. *Natural rate of unemployment* adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan pengangguran yang terjadi pada saat pasar tenaga kerja dalam kondisi seimbang.

Perbandingan besarnya *natural rate of unemployment* dengan tingkat pengangguran dapat digunakan untuk mendeteksi apakah perekonomian dalam kondisi resesi atau *boom*. Perekonomian dikatakan mengalami resesi apabila *natural rate of unemployment* lebih rendah dari tingkat pengangguran aktual. Sebaliknya, perekonomian dikatakan mengalami *boom* apabila *natural rate of unemployment* lebih tinggi dari tingkat pengangguran aktual. Lebih jauh, *natural rate of unemployment* dihitung dengan menggunakan rumus “jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaannya dibagi total pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan pengangguran yang mendapatkan pekerjaan dikalikan 100 persen”.

BPS Kota Magelang merilis data tingkat kesempatan kerja (diolah) dan tingkat pengangguran terbuka untuk periode 2011-2014. Data tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 5.3.2. Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: diolah dari Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun.

Dari Gambar nampak bahwa secara rata-rata tingkat kesempatan kerja di Kota Magelang adalah 91,34 persen, sementara tingkat penganggurannya adalah 8,66 persen. Selanjutnya, berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS tersebut, dengan periode yang lebih panjang (2009-2014), dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kehilangan pekerjaan adalah sebesar 4,26 persen (dihitung oleh tim peneliti) dan tingkat mendapatkan pekerjaan bagi para penganggur adalah 18,39 persen. Dari data tersebut dapat dihitung besarnya *natural rate of unemployment*, yakni sebesar 18,80 persen. Apabila dibandingkan antara tingkat pengangguran aktual (8,66%) dengan *natural rate of unemployment* (18,80%) di Kota Magelang,

maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Magelang mengalami *boom* pada periode 2011-2014. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *boom* tersebut terjadi karena adanya peningkatan dari sisi permintaan. Dari sudut pandang teori ekonomi makro, boom ini adalah sesuai dengan prediksi teori makro ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa perkembangan perekonomian sebaiknya didorong oleh sisi permintaan. Dengan begitu, aliran makro ekonomi Keynesian berpendapat bahwa kebijakan moneter dan fiskal bisa menjadi efektif.

4.3.10. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Analisa terhadap masalah kemiskinan dapat mengacu kepada tiga variabel, yakni persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Berikut ini disajikan data kemiskinan di Kota Magelang pada periode 2012-2016:

Tabel 4.3.13. Kemiskinan di Kota Magelang Periode 2012-2016

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2012	10.31	1.48	0.33
2013	9.8	1.45	0.37
2014	9.14	0.94	0.2
2015	9.05	1.39	0.31
2016	8.79	1.2	0.23

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016

Berdasarkan tabel di atas, Pada periode 2012-2016 persentase penduduk miskin Kota Magelang terus mengalami penurunan. Selain itu, secara umum, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Magelang cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Magelang juga semakin menyempit meskipun sempat terjadi kejutan di tahun 2015, pada tahun tersebut P1 tiba-tiba menaik. Ini merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Selanjutnya, pada periode 2012-2016, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan tren yang menurun. Ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Magelang semakin rendah. Dengan demikian, secara umum berdasarkan P0, P1, dan P2 masalah kemiskinan di Kota Magelang masih perlu terus diselesaikan.

Selanjutnya, gini rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan sekaligus menegaskan kesimpulan bahwa kemiskinan masih perlu diselesaikan. Semakin besar gini rasio (mendekati 1), maka ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan semakin parah. Demikian sebaliknya. Semakin rendah gini rasio (mendekati 0), maka distribusi pendapatan semakin seimbang di masyarakat. Gini rasio erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Semakin maju suatu perekonomian, maka pendapatan

per kapita akan semakin tinggi. Jika distribusi pendapatan semakin merata untuk seluruh masyarakat dalam kondisi perekonomian yang bertumbuh dengan baik, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Itu artinya, semakin rendah gini rasio, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Namun demikian, pustaka terdahulu menunjukkan bahwa pergerakan gini rasio dan tingkat kemiskinan di negara sedang berkembang dapat berkebalikan⁵. Misalnya, menurunnya gini rasio dapat disertai dengan meningkatnya kemiskinan, atau bahkan, meningkatnya gini rasio dapat disertai dengan menurunnya kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena gini rasio mengukur kesejahteraan secara relatif, bukan secara absolut. Atau, gini rasio dapat berubah karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas pendapatan.

Fakta hubungan antara persentase penduduk miskin dan Gini rasio di Kota Magelang ditunjukkan oleh hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi untuk periode 2012-2015, persentase penduduk miskin cenderung memiliki hubungan yang positif dengan indeks Gini meskipun hubungan tersebut tidak signifikan (koefisien korelasinya adalah sebesar 0,34). Hal ini

⁵Lihat hasil riset Mellor (1990) dalam artikelnya yang berjudul "Dramatic Poverty Reduction in the Third World: Prospects and Needed Action" yang diterbitkan oleh the Australian Centre for International Agricultural Research and the National Centre for Development Studies the Australian National University.

menunjukkan bahwa secara umum Gini rasio yang menurun di Kota Magelang disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin. Demikian sebaliknya, peningkatan Gini rasio disertai dengan peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Magelang.

Hasil analisis hubungan persentase penduduk miskin dan indeks gini Kota Magelang mengindikasikan bahwa di Kota Magelang tidak sedang menghadapi masalah krusial seperti *aging populations* dan peningkatan tingkat perceraian. Selain itu, hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa di Kota Magelang migrasi penduduk dan pergerakan pendapatan dapat dikatakan relatif stabil. Gini rasio di Kota Magelang bisa saja naik, misalnya dari tahun 2013 ke tahun 2014. Namun, pada periode tersebut persentase penduduk miskin menurun. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya bantuan pemerintah pusat maupun provinsi untuk pengentasan kemiskinan, ataupun penerimaan pendapatan warga Kota Magelang yang didapatkan dari bekerja di Kota/Kabupaten lain yang terutama lokasinya berdekatan dengan Kota Magelang.

Tabel 4.3.14. Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Kota Magelang Periode 2012-2016

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Gini
2012	10.31	0.37
2013	9.8	0.33
2014	9.14	0.36
2015	9.05	0.34
2016	8.79	NA

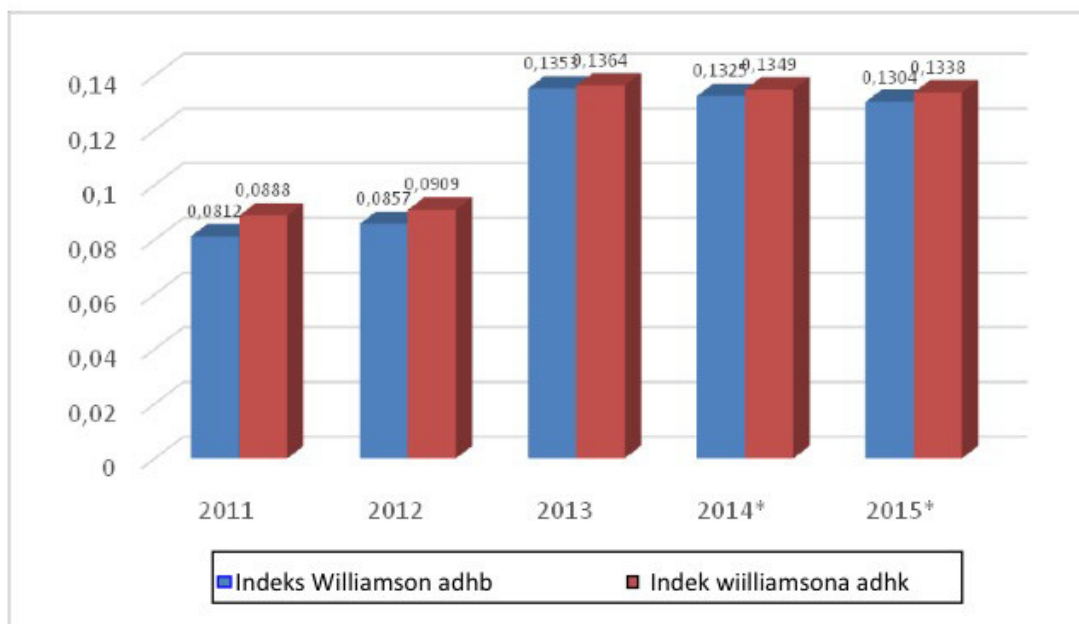
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016

4.3.11. Kesenjangan Intra Wilayah

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah, selain mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan. Kesenjangan antar wilayah di sebuah kabupaten/kota, dalam hal ini kesenjangan antar kecamatan, dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson berada antara 0 dan 1. Semakin Indeks Williamson mendekati 1, maka kecamatan di suatu kabupaten/kota semakin timpang. Sebaliknya, semakin Indeks Williamson mendekati 0, maka ketimpangan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota semakin berkurang.

Berikut disajikan gambar yang menunjukkan Indeks Williamson Kota Magelang untuk periode 2011-2015.

Gambar 4.3.3. Indeks Williamson Kota Magelang, Periode 2011-2015



Sumber: Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan antar kecamatan di Kota Magelang tidak terlalu signifikan. Pada tiga tahun terakhir perkembangan ketiga kecamatan terus menunjukkan pemerataan. Ketimpangan yang rendah ini dapat terjadi karena kondisi geografis kecamatan-kecamatan di Kota Magelang yang relatif seragam. Dengan keseragaman tersebut,

aktivitas ekonomi masyarakat kecamatan di tiap-tiap kecamatan di Kota Magelang relatif homogen sehingga menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomi yang relatif seragam. Contohnya, kecamatan-kecamatan di Kota Magelang cenderung bergerak di sektor yang sama, yakni sektor jasa dan usaha perdagangan.

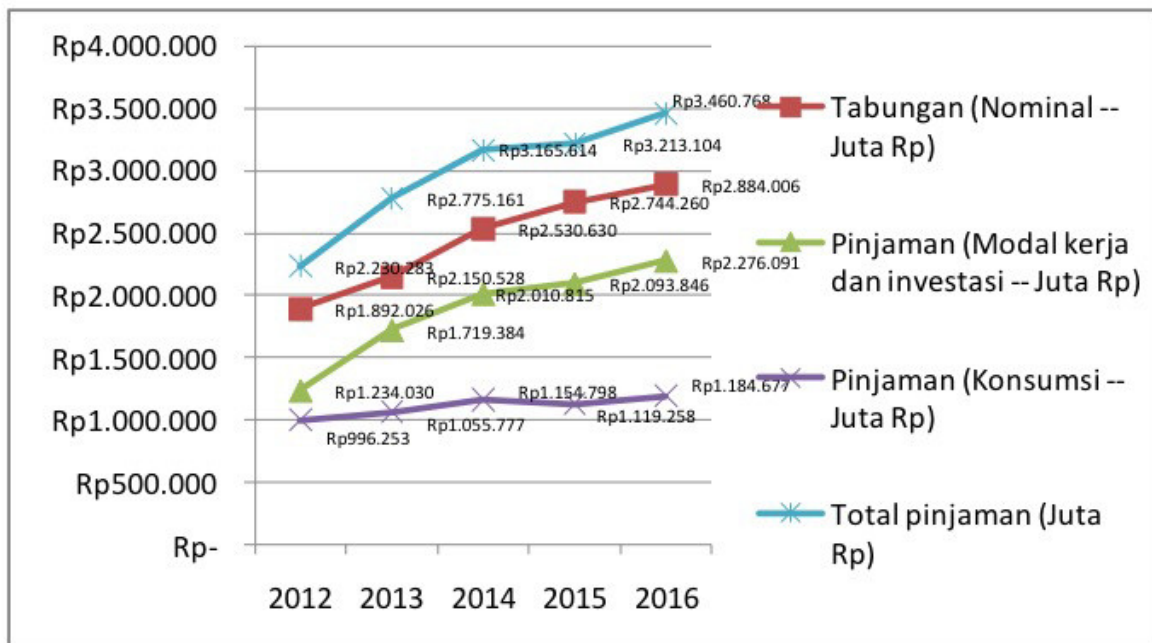
4.3.12. Tabungan Masyarakat dan Pinjaman

Dalam perekonomian terbuka, besarnya tabungan (saving) tidak harus sama dengan besarnya investasi. Atau dengan perkataan lain untuk konteks pemahaman yang sama, besarnya output yang dihasilkan tidak harus sama dengan total pengeluaran. Dalam perekonomian terbuka, apabila besarnya investasi lebih besar dari tabungan (pengeluaran lebih besar dari output yang dihasilkan), maka sektor bisnis selaku investor di sektor riil dapat meminjam uang ke perekonomian lain. Atau sebaliknya, jika investasi di suatu perekonomian terbuka nilainya lebih rendah dari tabungan (pengeluaran lebih rendah dari output yang dihasilkan), maka perbankan di perekonomian terbuka tersebut dapat menyalurkan pinjaman kepada investor di sektor riil di perekonomian lain.

Secara umum, jenis pinjaman yang disediakan oleh perbankan di Kota Magelang ada tiga, yakni pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan pinjaman untuk konsumsi. Itu artinya, secara

simultan perbankan di Kota Magelang juga menerima tabungan dari masyarakat. Lihat Gambar 4.3.4.

Gambar 4.3.4. Tabungan dan Pinjaman di Kota Magelang, Periode 2012-2016



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Tengah. (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, nilai total pinjaman di Kota Magelang yang didapatkan dari perbankan di Kota Magelang pada periode 2012-2016 lebih tinggi dari nilai tabungan di perbankan Kota Magelang pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Magelang pada periode 2012-2016 bersifat terbuka. Kekurangan uang dari dana tabungan (yang dihimpun oleh

perbankan Kota Magelang) untuk investasi pada periode 2012-2016, besar kemungkinan didanai oleh tabungan yang disimpan di perbankan di luar Kota Magelang, meskipun bisa saja kekurangan tersebut didanai dengan dana tabungan yang disimpan di luar bank. Dengan dugaan seperti ini, secara simultan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Magelang untuk menghasilkan produk dan menjualnya ke luar Kota Magelang masih lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat Kota Magelang dari luar Kota Magelang. Dengan kata lain, pada periode 2012-2016, pengeluaran masyarakat Kota Magelang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa final yang dihasilkan oleh kabupaten atau kota lain di sekitarnya.

4.3.13. Investasi dan Suku Bunga Perbankan

Secara teoritis, hubungan antara suku bunga dan investasi adalah negatif. Dengan asumsi bahwa sektor bisnis tidak mampu mencapai tingkat pengembalian yang serendah-rendahnya sama dengan suku bunga, sektor bisnis akan mengurangi permintaan untuk investasi. Selanjutnya, dengan menggunakan data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Kota Magelang sebagai proksi permintaan investasi di Kota Magelang dan data rata-rata per tahun bunga pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi dari perbankan di Indonesia, maka dilakukan uji korelasi pada periode 2012-2016 untuk

melihat hubungan antara suku bunga pinjaman dan permintaan investasi di Kota Magelang.

Hasil uji korelasi mendapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,063. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara suku bunga pinjaman dengan permintaan investasi di Kota Magelang. Hasil tersebut juga mengindikasikan tidak terdapat hubungan negatif antara suku bunga pinjaman dengan permintaan investasi sesuai dengan prediksi teori. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka pada periode 2012-2016 hubungan antara suku bunga pinjaman dan permintaan investasi dapat disimpulkan bersifat inelastis. Ini menunjukkan bahwa pada periode 2012-2016 investasi di Kota Magelang berhubungan dengan faktor-faktor lain di luar suku bunga pinjaman.

4.3.14. ICOR

Selanjutnya berbicara mengenai kebutuhan investasi Kota Magelang, berdasarkan perhitungan nilai ICOR, maka dapat ditentukan kebutuhan investasi (dalam hal ini PMTB) Kota Magelang. Setiap tahun, secara rata-rata, Kota Magelang membutuhkan investasi (PMTB) sebesar 1,6 triliun rupiah. Dengan nilai investasi tersebut, secara rata-rata, Kota Magelang dapat menghasilkan output sebesar 317,37 miliar rupiah. Nilai output yang dihasilkan tersebut adalah

seperlima dari total nilai investasi (PMTB) yang dilakukan oleh sektor bisnis di Kota Magelang. Hal ini mengingat besarnya ICOR per tahun, secara rata-rata, adalah 5,24.

Tabel 4.3.15. ICOR, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Investasi Kota Magelang, Periode 2012-2016

Tahun	ICOR	Pertumb Ekonomi (dalam %)	Kebutuhan Investasi (dalam juta rupiah)
2012	5.09	5.37	Rp 1,334,862.28
2013	5.27	6.04	Rp 1,706,704.79
2014	4.54	4.98	Rp 1,339,776.17
2015	5.22	5.11	Rp 1,729,210.70
2016	6.08	5.17	Rp 2,204,015.19
Rata-rata	5.24	5.33	Rp 1,662,913.82

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

Jika dikaitkan dengan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persentase perubahan ICOR searah dengan persentase perubahan kesempatan kerja. Pada tahun 2013 ketika ICOR meningkat sebesar 3,73% kesempatan kerja meningkat 2,46%. Sebaliknya, pada tahun 2014 ketika ICOR menurun sebesar 13,94% persen kesempatan kerja juga menurun sebesar 0,68%.

Dengan demikian, peningkatan efisiensi dalam kegiatan investasi terindikasi belum tentu membuka kesempatan kerja baru.

4.3.15. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki peran serta tanggung jawab untuk mengelola pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mengelola secara efektif dan efisien sumber pendanaan, baik melalui penyerahan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dan skema transfer. Pemerintah daerah selanjutnya mengelola dana dalam APBD. Pengelolaan dana tersebut secara simultan dijadikan instrumen kunci bagi pelaksanaan kebijakan publik. APBD ditetapkan dengan persetujuan DPRD. Berikut adalah tabel yang menunjukkan APBD Kota Magelang untuk tahun 2016.

Tabel 4.3.16. APBD Kota Magelang, Tahun 2016

APBD	2016		Keterangan
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	Rp 823,177,275,000	Rp 823,177,275,000	-
Belanja	Rp 1,017,467,369,000	Rp 1,017,467,369,000	-
Pembiayaan Daerah	Rp 194,290,094,000	Rp 194,161,166,530	-
PAD	Rp 197,465,478,000	Rp 197,465,478,000	Efektif
Belanja Modal	Rp 246,508,674,000	Rp 221,924,457,916	-

APBD	2016		Keterangan
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 44,510,249,000	Rp 40,785,045,910	-
SiLPA		Rp 162,338,263,403	-
Pembayaran pokok hutang dan bunga	Rp -	Rp -	-
Pajak	Rp 24,748,872,000	Rp 25,974,837,133	Efektif
Retribusi	Rp 6,001,756,000	Rp 6,662,360,989	Efektif
Transfer	Rp -	Rp -	-
Utang	Rp -	Rp -	-

Sumber: data sekunder yang diterbitkan oleh BPKAD Kota Magelang per 29 Maret 2017. Data belum diaudit oleh BPK.

5.3.15.1. Analisis Pendapatan

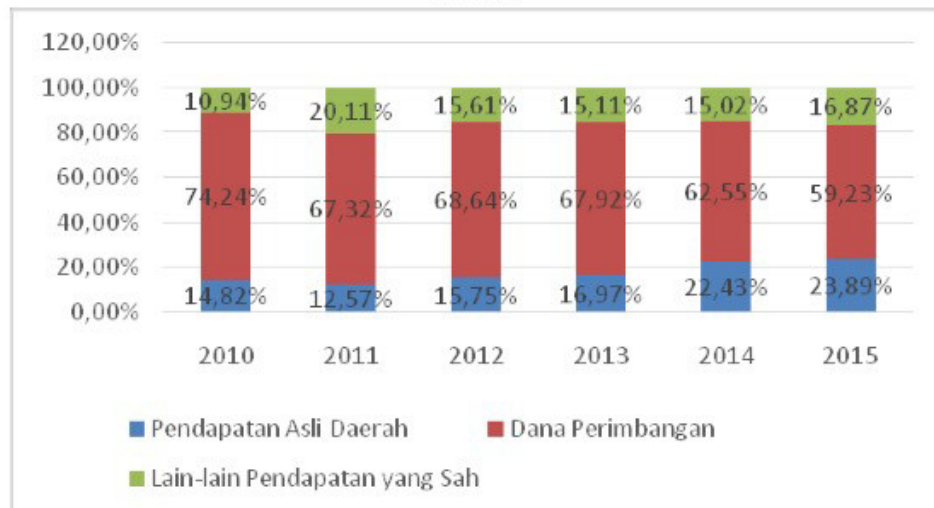
Pendapatan pemerintah daerah dapat berasal dari tiga sumber, yakni (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren pendapatan Kota Magelang pada periode 2010-2015 dan grafik proporsi pendapatan Kota Magelang periode 2010 - 2015.

Gambar 4.3.5. Tren Pendapatan Kota Magelang, Periode 2010-2015



Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

Gambar 4.3.6. Proporsi Pendapatan Kota Magelang, Periode 2010-2015



Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

4.3.15.1.1. Derajat Desentralisasi

PAD Kota Magelang, secara rata-rata untuk periode 2010-2015, hanya menyumbang sebesar 17,74 persen terhadap total pendapatan Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Magelang belum sepenuhnya mampu membiayai pengeluarannya sendiri secara menyeluruh. Kemampuan Kota Magelang untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang. Dengan perkataan lain, derajat desentralisasi Kota Magelang masuk dalam kategori kurang karena nilai 17,74 persen berada pada derajat desentralisasi kategori kurang, yakni 10,01%-21%. Namun demikian, tren derajat desentralisasi Kota Magelang makin naik. Sejak tahun 2014, Kota Magelang naik peringkat masuk dalam kategori cukup dan telah mencapai derajat desentralisasi 23,89 persen di tahun 2015.

5.3.15.1.2. Rasio Ketergantungan Daerah

Selama periode 2010-2015, pendapatan Kota Magelang didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan (dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi). Secara rata-rata, pada periode 2010-2015 dana perimbangan yang diterima oleh Kota Magelang sebesar 66,65 persen dari total pendapatannya. Dengan posisi seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang masih

bergantung pada Pemerintah Pusat. Dalam matriks ketergantungan keuangan daerah, Kota Magelang dengan angka sebesar 66,65 persen berada dalam kategori sangat tinggi, artinya Pemerintah Kota Magelang sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Namun demikian, tren ketergantungan tersebut terus menurun. Terlihat dari 74,24 persen (2010) menjadi 59,23 persen (2015)

4.3.15.1.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD tersebut dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada periode 2010-2015, PAD Kota Magelang menunjukkan tren yang meningkat. Semua komponen pembentuk PAD Kota Magelang juga cenderung menunjukkan peningkatan. Komponen terbesar penyumbang PAD Kota Magelang pada periode 2010-2015 adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang besarnya rata-rata mencapai 74,80 persen per tahun. Penerimaan dari pajak daerah masih tergolong kecil. Untuk periode 2010-2015 besarnya secara rata-rata per tahun adalah 14,14 persen.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang secara rata-rata untuk periode 2010-2015 adalah sebesar 21,87 persen. Angka tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, kemampuan keuangan Kota Magelang untuk melaksanakan otonomi daerah (pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari Pemerintah Pusat) masih rendah sekali. Kedua, dengan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Magelang adalah bersifat instruktif. Di sini, peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Kota Magelang. Namun demikian, tren rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin semakin baik. Pada tahun 2015 Kota Magelang telah mencapai pola hubungan konsultatif dengan Pemerintah Pusat. Ini artinya pola pengarah (campur tangan) dari pemerintah pusat telah mulai berkurang oleh karena kemampuan Pemerintah Kota Magelang telah mulai meningkat.

4.3.15.2. Indeks Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal adalah ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyediakan dana untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah tersebut. Ruang fiskal selanjutnya dapat

dikategorikan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui posisi ruang fiskal, selanjutnya digunakan Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, IRFD dihitung berdasarkan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara nasional. KFD itu sendiri adalah kemampuan keuangan daerah dan dana transfer ke daerah, dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. KFD riil per kapita dihitung berdasarkan KFD dibagi jumlah penduduk dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi). IRFD Kota Magelang periode 2012-2016 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.3.17. Indeks Ruang Fiskal Kota Magelang Periode 2012-2016

Tahun	Indeks Ruang Fiskal Daerah	Keterangan
2012	0,60	Sedang
2013	1,14	Tinggi
2014	0,75	Sedang
2015	0,95	Sedang
2016	1,33	Tinggi
Rata-rata	0,95	Sedang

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara rata-rata IRFD Kota Magelang masuk dalam kategori sedang. Itu

berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang untuk menyediakan anggaran, misalnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, tidak akan menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah tersebut secara signifikan. Pada kondisi tahun terakhir, yakni tahun 2016, bahkan IRFD Pemerintah Kota Magelang tergolong tinggi. Itu berarti bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki dana yang cukup untuk membantu perbaikan masalah sosial ekonomi dalam rangka menciptakan perekonomian Kota Magelang yang lebih baik.

4.3.16. Utang Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 tercatat tidak memiliki utang. Hal ini dapat berarti baik karena Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 tidak menyebabkan terjadinya *crowding out*, yakni menurunnya pengeluaran investasi (PMTB) sektor bisnis Kota Magelang sebagai akibat dari utang pemerintah kepada pihak perbankan yang menyebabkan naiknya suku bunga pinjaman. Kebutuhan dana Pemerintah Kota Magelang untuk membiayai pembangunan sejauh ini dapat dipenuhi dari dana yang berasal dari PAD, dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, dan SiLPA.

Namun demikian, posisi Pemerintah Kota Magelang yang tercatat tidak memiliki utang dapat berarti bahwa Pemerintah Kota Magelang tidak terlalu memusatkan kebijakan pada kebijakan yang bersifat ekspansif. Kebijakan yang bersifat ekspansif ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan siklus bisnis. Umumnya, kebijakan yang sangat ekspansif diterapkan untuk cepat menyerap pengangguran agar dapat masuk ke dunia kerja. Barangkali wajar jika seandainya Pemerintah Kota Magelang tidak menerapkan kebijakan yang begitu ekspansif mengingat, seperti telah dijelaskan pada bagian lain, tingkat pengangguran aktual Kota Magelang berada di bawah *natural rate of unemployment*.

4.3.17. Penduduk dan Konsumsi

Penduduk (baik dalam aspek jumlah maupun pertumbuhan) dan konsumsi adalah saling berkaitan. Pemikiran awal mengenai hal ini dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Dalam bukunya yang berjudul "*An Essay on the Principle of Population*" yang diterbitkan pada 1798, Malthus menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan berkurangnya jumlah pasokan makanan per orang. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pasokan makanan.

Konsumsi tidak hanya berbicara mengenai pengeluaran untuk makanan, namun juga pengeluaran untuk barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pertumbuhan jumlah penduduk akan menaikkan persaingan untuk mendapatkan barang dan jasa. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah penduduk dapat mempengaruhi standar kehidupan masyarakat. Apabila penduduk terus bertambah namun standar kehidupan tidak berubah, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian terjebak dalam suatu perangkap yang disebut dengan “Perangkap Malthus”. Perangkap tersebut menjelaskan bahwa seringkali pendapatan bersifat stagnan karena inovasi dan kemajuan teknologi yang mulanya digunakan untuk meningkatkan standar kehidupan (tingkat konsumsi atau pengeluaran per kapita) ternyata hanya menyebabkan penambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan pada data pertumbuhan jumlah penduduk dan PDRB per kapita yang digunakan sebagai proksi pengeluaran per kapita Kota Magelang, maka dapat disimpulkan bahwa pada periode 2012-2016 penambahan jumlah penduduk di Kota Magelang lebih lambat bila dibandingkan dengan penambahan PDRB per kapita. Fenomena ini mengindikasikan Kota Magelang tidak masuk dalam “Perangkap Malthus”. Ini berarti bahwa upaya pemerintah dan pelaku ekonomi Kota Magelang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui inovasi dan pengembangan teknologi lebih mendorong pengeluaran per kapita dibandingkan pertumbuhan penduduk.

Tabel 4.3.18. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Magelang, Periode 2012-2016

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (Rp.)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	PDRB Per Kapita ADHK (Rp.)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Jumlah Penduduk
2012	40,933,765		37,551,652		119,420	
2013	44,686,250	9.17%	39,665,765	5.63%	119,880	0.39%
2014	49,205,553	10.11%	41,449,649	4.50%	120,440	0.47%
2015	53,650,729	9.03%	43,441,132	4.80%	120,790	0.29%
2016	57,924,731	7.97%	45,566,786	4.89%	121,110	0.26%
Rata-rata	49,280,206	9.07%	41,534,997	4.96%	120,328	0.35%

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka 2017, (Diolah).

4.3.18. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia, disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menaksir tingkatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah/wilayah. Tingkatan tersebut bisa saja (1) sangat tinggi [IPM $\geq$ 90], (2) tinggi [IPM 80-89,9], (3) medium [IPM 50-79,9], atau rendah [IPM < 50]. Penentuan tingkatan-tingkatan dimaksud didasarkan pada tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sebuah daerah dengan IPM yang sangat tinggi berarti bahwa daerah tersebut memiliki

tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita yang sangat tinggi pula.

IPM Kota Magelang adalah 77,2 pada tahun 2016, atau 75,9 untuk rata-rata periode 2012-2016. Dengan nilai-nilai tersebut, IPM Kota Magelang dikategorikan ke dalam kelompok medium. Angka IPM tersebut lebih tinggi dari IPM Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita Kota Magelang tergolong tinggi untuk Indonesia. Hal ini juga mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kota Magelang dapat dikatakan sudah lebih maju dibandingkan wilayah-wilayah lainnya, khususnya di Eks Karesidenan Kedu.

Tabel 4.3.19. Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Kedu Periode 2012-2016

Tahun	Indonesia	Jawa Tengah	Kota Magelang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Magelang
2012	68,7	67,2	75,0	69,4	64,9	64,2	64,5	64,8
2013	68,3	68,0	75,3	69,8	65,5	64,6	64,9	65,9
2014	68,9	68,8	75,8	70,1	66,0	65,2	65,7	66,4
2015	69,6	69,5	76,4	70,4	67,1	65,7	66,9	67,1
2016	70,2	70,0	77,2	70,7	67,6	66,2	67,4	67,9
Rata-rata	69,1	68,7	75,9	70,1	66,2	65,2	65,9	66,4

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka 2017

4.4. Analisis Komparatif Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Dengan Kota/Kabupaten Lain di Eks Karesidenan Kedu

Bagian ini menjelaskan perbandingan hubungan indikator-indikator makro ekonomi di Kota Magelang dan di eks Karesidenan Kedu. Perbandingan bukan hanya dilakukan antara Kota Magelang dengan Eks Karesidenan Kedu, namun antar dua periode waktu, yakni 2011-2015 dan 2012-2016. Hal ini untuk melihat adakah perbedaan signifikan antar waktu pengamatan. Selanjutnya, hubungan-hubungan antar variabel makro ekonomi diukur dengan menggunakan koefisien korelasi. Dua buah indikator makro ekonomi dikatakan memiliki hubungan yang kuat apabila nilai koefisien korelasi kedua indikator makro ekonomi tersebut $\geq 0,8$. Selanjutnya, indikator-indikator makro ekonomi yang dianalisis keterkaitannya adalah pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, gini rasio, persentase penduduk miskin, UMK, dan garis kemiskinan. Data-data yang dianalisis adalah data-data untuk periode 2011-2015.

4.4.1. Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Kota Magelang

Dari 8 (delapan) indikator makro ekonomi Kota Magelang yang dianalisis keterkaitannya, tidak seluruhnya terkait antara satu sama lain. Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat 6 (enam)

hubungan yang signifikan, baik hubungan yang positif maupun hubungan yang negatif. Yang memiliki hubungan positif dan signifikan adalah antara (1) UMK dengan IPM ($r = 0,98$), (2) garis kemiskinan dengan IPM ($r = 0,97$), dan (3) garis kemiskinan dengan UMK ($r = 0,97$). Sementara yang menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan adalah antara (1) persentase penduduk miskin dengan IPM ($r = -0,84$), (2) UMK dengan persentase penduduk miskin ($r = -0,86$), dan (3) garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin ($r = -0,90$). Yang mengejutkan adalah hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang lemah antara pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dengan indikator-indikator makro ekonomi lainnya di Kota Magelang, seperti IPM ($r = -0,26$), tingkat pengangguran ($r = 0,06$), tingkat inflasi ($r = -0,37$), Gini rasio ($r = 0,49$), persentase penduduk miskin ($r = 0,57$), UMK ($r = -0,22$), dan garis kemiskinan ($r = -0,27$).

Dari hasil analisis korelasi yang telah diungkapkan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diambil sebagai temuan dalam rangka memberikan gambaran perekonomian Kota Magelang pada periode 2011-2015:

1. UMK dan garis kemiskinan Kota Magelang yang berhubungan positif dan signifikan menunjukkan bahwa kenaikan UMK di Kota Magelang berhubungan erat dengan garis kemiskinan di Kota

Magelang. Kenaikan UMK tersebut berhubungan kuat dengan meningkatnya kebutuhan hidup minimal. Atau dengan kata lain, kenaikan UMK tersebut berhubungan signifikan dengan kenaikan level kesejahteraan minimal. Hal ini baik.

2. Kenaikan UMK di Kota Magelang dapat dikatakan baik karena berhubungan dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kota Magelang. Kenaikan UMK tersebut terindikasi berkaitan erat dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat, terutama penduduk miskin.
3. Kaitan yang negatif dan signifikan antara persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Magelang mengindikasikan upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan keberhasilan. Hal ini diperkuat dengan data periode 2011-2015 yang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Magelang terus menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun yang disertai dengan garis kemiskinan Kota Magelang yang terus meningkat pada periode yang sama.
4. Kaitan IPM dan persentase penduduk miskin yang negatif dan signifikan di Kota Magelang menunjukkan bahwa kenaikan IPM di Kota Magelang berkaitan dengan penurunan persentase penduduk miskin di Kota Magelang. Kenaikan IPM tersebut

menunjukkan kenaikan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat di Kota Magelang sehingga masyarakat di Kota Magelang dapat meningkatkan pengeluaran dan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu persentase penduduk miskin di Kota Magelang dapat berkurang.

5. Kaitan IPM yang signifikan dan positif dengan UMK dan garis kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan bahwa kenaikan IPM di Kota Magelang disertai dengan kenaikan UMK dan garis kemiskinan di Kota Magelang. Naiknya IPM tersebut berkaitan dengan naiknya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kota Magelang. Dengan adanya kenaikan-kenaikan tersebut tidak mengherankan jika UMK di Kota Magelang juga turut meningkat.

4.4.2. Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Eks Karesidenan Kedu Lainnya

Analisis korelasi terhadap 8 (delapan) indikator makro ekonomi di Kota Magelang juga dilakukan di eks Karesidenan Kedu lainnya pada periode yang sama untuk pembandingan bagi Kota Magelang. Hasilnya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi di eks Karesidenan Kedu lainnya umumnya tidak memiliki keterkaitan dengan indikator makro ekonomi lainnya. Namun demikian, terdapat dua kabupaten di eks Karesidenan Kedu

yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan indikator makro ekonomi lainnya, yakni di Kabupaten Magelang dan di Kabupaten Wonosobo.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo ditemukan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran ($r = -0,83$). Artinya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo memiliki keterkaitan yang kuat dengan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten tersebut. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo lebih bersifat inklusif, yakni mampu melibatkan lebih banyak masyarakat untuk masuk ke pasar tenaga kerja untuk selanjutnya menghasilkan barang dan jasa final.

Kedua, UMK dan garis kemiskinan di eks Karesidenan Kedu lainnya menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya koefisien korelasi untuk kedua indikator tersebut yang seluruhnya di atas 0,8. Ini berarti bahwa kenaikan UMK di eks Karesidenan Kedu lainnya berhubungan kuat dengan naiknya garis kemiskinan. Kenaikan UMK tersebut berhubungan kuat dengan meningkatnya kebutuhan hidup minimal. Atau dengan kata lain, kenaikan UMK tersebut berhubungan signifikan dengan kenaikan level kesejahteraan minimal di eks Karesidenan Kedu lainnya.

Ketiga, hubungan signifikan dan negatif antara persentase penduduk miskin dan UMK ditunjukkan oleh seluruh kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu lainnya. Sementara itu, kecuali untuk Kabupaten Wonosobo, antara persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan juga menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan. Untuk Kabupaten Wonosobo, hubungan antara persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan juga bersifat negatif namun tidak signifikan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis korelasi, kenaikan UMK di seluruh kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu lainnya dapat dikatakan baik karena berhubungan dengan menurunnya persentase penduduk miskin. Kenaikan UMK dinilai berkaitan erat dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat, terutama penduduk miskin.

Sementara itu, data periode 2011-2015 di eks Karesidenan Kedu lainnya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terus menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disertai dengan garis kemiskinan yang terus meningkat. Hubungan yang signifikan diantara persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan menunjukkan bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu lainnya cenderung menunjukkan keberhasilan.

Keempat, pada periode 2011-2015 hubungan antara IPM dengan persentase penduduk miskin, IPM dengan UMK, dan IPM dengan garis kemiskinan di eks Karesidenan Kedu lainnya menunjukkan hubungan yang signifikan. Hubungan IPM dengan persentase penduduk miskin adalah negatif. Sementara itu, hubungan antara IPM dengan UMK, dan IPM dengan garis kemiskinan adalah positif. Hubungan IPM dan penduduk miskin yang negatif dan signifikan menunjukkan bahwa kenaikan IPM di eks Karesidenan Kedu lainnya berkaitan dengan penurunan persentase penduduk miskin. Kenaikan IPM menunjukkan kenaikan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan pengeluaran dan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu persentase penduduk miskin di eks Karesidenan Kedu dapat berkurang. Selanjutnya, hubungan IPM yang signifikan dan positif dengan UMK dan garis kemiskinan di eks Karesidenan Kedu lainnya menunjukkan bahwa kenaikan IPM disertai dengan kenaikan UMK dan garis kemiskinan. Naiknya IPM berkaitan dengan naiknya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya kenaikan-kenaikan tersebut tidak mengherankan jika UMK di eks Karesidenan Kedu lainnya juga turut meningkat. Berikutnya, meningkatnya UMK berkaitan pula dengan meningkatnya garis kemiskinan.

Kelima, pada periode 2011-2015, hubungan antara IPM dan Gini rasio di eks Karesidenan Kedu lainnya umumnya menunjukkan arah yang positif meskipun tidak signifikan. Hubungan IPM dan Gini rasio yang positif dan signifikan hanya terjadi di Kabupaten Magelang. Sementara itu, walau tidak signifikan, hubungan antara IPM dan Gini rasio di Kabupaten Kebumen cenderung negatif. Hubungan positif dan signifikan antara IPM dan Gini rasio di Kabupaten Magelang dapat menunjukkan adanya gejala-gejala peningkatan IPM yang bias pada golongan-golongan pendapatan tertentu. Dengan kata lain, tidak semua golongan mengalami kenaikan IPM yang proporsional. Akibatnya, kenaikan IPM berkaitan dengan naiknya kesenjangan pendapatan di Kabupaten Magelang. Gejala yang demikian, walau tidak signifikan, juga muncul di eks Karesidenan Kedu lainnya, kecuali Kabupaten Kebumen.

Keenam, hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan Gini rasio pada periode 2011-2015 di eks Karesidenan Kedu lainnya hanya terjadi di Kabupaten Purworejo. Sifat dari hubungan tersebut adalah positif. Itu berarti bahwa di Kabupaten Purworejo kenaikan tingkat pengangguran terkait dengan kenaikan Gini rasio. Hal ini wajar mengingat kenaikan tingkat pengangguran menggambarkan bertambahnya penduduk usia kerja yang kehilangan atau tidak mendapatkan pekerjaan, yang berarti

bahwa terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Kebumen meskipun tidak signifikan.

Ketujuh, pada periode 2011-2015 di eks Karesidenan Kedu lainnya, hubungan yang signifikan antara Gini rasio dengan persentase penduduk miskin dan Gini rasio dengan garis kemiskinan hanya terjadi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen. Namun demikian, hubungan variabel-variabel tersebut berbeda sifatnya di kedua kabupaten dimaksud. Hubungan Gini rasio dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang adalah negatif, sementara hubungan tersebut adalah positif di Kabupaten Kebumen. Kemudian, hubungan Gini rasio dengan garis kemiskinan adalah positif di Kabupaten Magelang, dan negatif di Kabupaten Kebumen. Hubungan antara Gini rasio dan persentase penduduk miskin yang negatif menunjukkan adanya peningkatan pendapatan golongan berpendapatan tinggi dan naiknya pendapatan golongan miskin namun tidak terlalu signifikan. Hubungan Gini rasio dan persentase penduduk miskin yang positif menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin memperbanyak jumlah penduduk miskin karena akses sumber daya cenderung semakin dikuasai oleh penduduk dengan golongan pendapatan tinggi. Kemudian, hubungan positif antara Gini rasio dan garis kemiskinan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang melebar diantara kelompok-kelompok

masyarakat disertai dengan naiknya kebutuhan hidup minimal. Kenaikan kebutuhan hidup minimal tersebut didominasi oleh kelompok berpenghasilan menengah dan tinggi sehingga menaikkan garis kemiskinan. Sementara itu, hubungan negatif antara Gini rasio dan garis kemiskinan menunjukkan ketimpangan pendapatan yang disertai dengan menurunnya kebutuhan hidup minimal. Ketimpangan pendapatan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan lebih banyak diserap oleh golongan kaya. Sementara itu, golongan menengah dan miskin menurun standar hidupnya.

4.4.3. Perbandingan Hubungan antar Indikator Makro Ekonomi di Kota Magelang dan di Eks Karesidenan Kedu Lainnya

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diungkapkan pada bagian 4.4.1. dan 4.4.2. maka selanjutnya dapat disajikan perbandingan hubungan antar indikator makro ekonomi Kota Magelang dan hubungan antar indikator makro ekonomi di eks Karesidenan Kedu lainnya sebagai berikut. Pertama, Kota Magelang menunjukkan hubungan yang paling kuat antara UMK dan garis kemiskinan dibandingkan hubungan kedua indikator tersebut di kabupaten lainnya di eks Karesidenan Kedu. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi UMK dan garis kemiskinan di Kota Magelang yang lebih tinggi. Dengan demikian, kenaikan UMK di Kota Magelang nilainya cukup baik jika dibandingkan dengan

kabupaten-kabupaten lainnya di eks Karesidenan Kedu. Cukup baik artinya kenaikan UMK di Kota Magelang tidak terlalu rendah dibandingkan dengan kenaikan UMK kabupaten-kabupaten lainnya di eks Karesidenan Kedu, dan kenaikan tersebut lebih efisien untuk memperbaiki standar hidup minimal. Sebagai informasi, berikut ini adalah urutan kenaikan UMK di eks Karesidenan Kedu secara berturut-turut: Kabupaten Kebumen (12,429%), Kabupaten Magelang (11,980%), Kabupaten Purworejo (11,825%), Kota Magelang (11,199%), Kabupaten Temanggung (10,901%), dan Kabupaten Wonosobo (10,849%).

Kedua, secara komparatif, hubungan antara persentase penduduk miskin dengan UMK Kota Magelang termasuk yang terkuat di eks Karesidenan Kedu. Namun, hubungan antara persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan Kota Magelang adalah termasuk yang tidak terlalu kuat diantara kabupaten/kota lainnya di eks Karesidenan Kedu. Ini berarti bahwa kebijakan UMK dan pengentasan masalah kemiskinan Kota Magelang masih di berada di kisaran rata-rata untuk eks Karesidenan Kedu. Hal dapat terjadi apabila UMK hanya diterima sebagian kecil golongan masyarakat Kota Magelang.

Ketiga, secara komparatif, walau signifikan, hubungan antara kenaikan IPM dengan penurunan persentase penduduk miskin Kota

Magelang dan Kabupaten Temanggung adalah yang paling lemah diantara kabupaten lainnya di eks Karesidenan Kedu. Oleh karena itu, dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang perlu mendorong IPM lebih baik lagi.

Keempat, secara komparatif, hubungan antara IPM dan UMK Kota Magelang adalah termasuk yang terkuat diantara kabupaten lainnya di eks Karesidenan Kedu. Demikian pula untuk hubungan antara IPM dan garis kemiskinan.

Kelima, Kota Magelang menunjukkan, sebagaimana di eks Karesidenan kedu lainnya, kecuali Kabupaten Kebumen, pada periode 2011-2015 hubungan antara IPM dan Gini rasio yang positif namun tidak signifikan. Hubungan yang cenderung positif antara IPM dan Gini rasio di Kota Magelang dapat menunjukkan adanya gejala-gejala peningkatan IPM yang bias pada golongan-golongan pendapatan tertentu. Dengan kata lain, tidak semua golongan mengalami kenaikan IPM yang proporsional. Akibatnya, kenaikan IPM berkaitan dengan naiknya kesenjangan pendapatan di Kota Magelang dan di eks Karesidenan Kedu lainnya, kecuali Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan IPM merata untuk semua golongan.

4.5. Permasalahan Utama Makro Ekonomi Kota Magelang

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, berikutnya dapat diungkapkan permasalahan utama makro ekonomi Kota Magelang pada periode 2011-2015 diantaranya. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang selama periode pengamatan, yakni pada periode 2011-2015, menunjukkan kecenderungan yang tidak diharapkan, baik secara teoritis maupun empiris. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cenderung berhubungan negatif dengan perubahan UMK, IPM, dan garis kemiskinan Kota Magelang.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang juga cenderung memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin, dan Gini rasio. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cenderung bersifat *exclusive* (tidak banyak melibatkan pelaku ekonomi di Kota Magelang) dan kurang *pro poor*. Padahal, seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya, UMK, IPM, garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, kebutuhan hidup minimal, dan tingkat kesejahteraan minimal berkaitan erat satu sama lain. Kegagalan pertumbuhan ekonomi membantu perbaikan indikator-indikator lainnya dapat mempengaruhi upaya Pemerintah Kota Magelang memajukan perekonomian Kota Magelang di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, masalah utama yang harus diselesaikan oleh

Pemerintah Kota Magelang adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan perbaikan di dalam perekonomian Kota Magelang.

Permasalahan utama tersebut cukup menantang untuk diselesaikan mengingat kondisi derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang yang masih harus terus ditingkatkan. Ketika rasio-rasio keuangan daerah tersebut masih harus terus diperbaiki, hal tersebut membuat perekonomian Kota Magelang tidak dapat bergantung pada intervensi Pemerintah Kota Magelang. Jika demikian, maka perekonomian Kota Magelang perlu untuk mengandalkan sektor swasta. Namun demikian yang menjadi persoalan berikutnya adalah ICOR Kota Magelang masih cukup tinggi (5,02). Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi sektor swasta masih harus diperbaiki⁶.

Permasalahan utama yang telah dijelaskan adalah sebuah isu strategis mengingat Kota Magelang adalah PKW yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Fungsi yang diarahkan untuk diemban oleh Kota Magelang tersebut

⁶Di Jateng, investasi cenderung *under estimate* karena kelemahan sistem pendataan dan kurangnya laporan (perusahaan) sehingga tidak dicatat. Yang tidak tercatat, 30-40 persen.

sangat kental dengan nuansa pembangunan ekonomi, baik dari skala kecil hingga pada skala besar.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pergerakan dan hubungan antar indikator makro ekonomi periode 2011-2015 dan 2012-2016 tidak jauh berbeda. Oleh karena itu hasil-hasil yang diperoleh dari analisis periode 2012-2016 dapat dijadikan pedoman untuk merumuskan kebijakan. Dan korelasi indikator makro kota magelang dengan wilayah eksKarisedenan Kedu dapat dilihat pada Tabel 4.4.1. – Tabel 4.4.6.

Tabel 4.4.1. Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang, Periode 2011-2015

Kota Magelang	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	-0.267515556	1					
Tingkat Pengangguran (%)	0.061154779	-0.568995132	1				
Inflasi (%)	-0.378465611	0.162849699	0.534725404	1			
Gini Rasio	0.495605659	0.174602275	-0.701725782	-0.401841613	1		
Penduduk Miskin (%)	0.575787072	-0.84283704	0.438460435	-0.495087237	-0.114733238	1	
UMK	-0.228638478	0.987617055	-0.647568113	0.139980355	0.312171959	-0.863628057	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	-0.270618377	0.974836025	-0.458187805	0.355110034	0.170765304	-0.901487709	0.972356873

Sumber: Statistik Daerah Kota magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun.(diolah)

**Tabel 4.4.2.Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Magelang,
Periode 2011-2015**

Kabupaten Magelang							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	-0.698833289	1					
Tingkat Pengangguran (%)	0.325757838	-0.251191927	1				
Inflasi (%)	-0.172778114	0.4457211	0.544055304	1			
Gini Rasio	-0.440380809	0.918519724	-0.251055238	0.255184325	1		
Penduduk Miskin (%)	0.808540603	-0.943893653	0.07650641	-0.440887488	-0.826543239	1	
UMK	-0.526867274	0.858189773	0.036033738	0.30436452	0.912826404	-0.902134783	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	-0.569430051	0.954847238	-0.001091947	0.51414863	0.93440183	-0.940404126	0.950009301

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

**Tabel 4.4.3.Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Purworejo, Periode 2011-2015**

Kabupaten Purworejo							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	-0.403206106	1					
Tingkat Pengangguran (%)	0.383175655	-0.085465752	1				
Inflasi (%)	-0.651614264	0.454345889	0.421165771	1			
Gini Rasio	0.125486226	0.231245655	0.808344347	0.473207172	1		
Penduduk Miskin (%)	0.553136757	-0.983612943	0.101323034	-0.575176591	-0.216733381	1	
UMK	-0.089292178	0.88880976	-0.285043242	-0.001775002	0.018112994	-0.804785425	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	-0.476486049	0.990572222	-0.106215741	0.518394202	0.164556107	-0.991826751	0.847018195

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

**Tabel 4.4.4.Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Periode 2011-2015**

Kabupaten Kebumen							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	0.431379404	1					
Tingkat Pengangguran (%)	0.579752939	-0.214186715	1				
Inflasi (%)	-0.686769431	-0.252161991	-0.609131599	1			
Gini Rasio	-0.262641772	-0.731235832	0.499484836	-0.315473506	1		
Penduduk Miskin (%)	0.019139173	-0.850069154	0.683036331	-0.214597445	0.834854982	1	
UMK	0.474264274	0.998533152	-0.185567446	-0.264942847	-0.743501486	-0.833943186	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	0.165513775	0.950471756	-0.468391719	0.039525169	-0.814121037	-0.964772164	0.939672594

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

**Tabel 4.4.5.Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Temanggung, Periode 2011-2015**

Kabupaten Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	-0.267515556	1					
Tingkat Pengangguran (%)	0.061154779	-0.568995132	1				
Inflasi (%)	-0.378465611	0.162849699	0.534725404	1			
Gini Rasio	0.495605659	0.174602275	-0.701725782	-0.401841613	1		
Penduduk Miskin (%)	0.575787072	-0.84283704	0.438460435	-0.495087237	-0.114733238	1	
UMK	-0.228638478	0.987617055	-0.647568113	0.139980355	0.312171959	-0.863628057	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	-0.270618377	0.974836025	-0.458187805	0.355110034	0.170765304	-0.901487709	0.972356873

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

**Tabel 4.4.6.Korelasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Wonosobo, Periode 2011-2015**

Kabupaten Wonosobo	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran (%)	Inflasi (%)	Gini Rasio	Penduduk Miskin (%)	UMK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1						
Indeks Pembangunan Manusia	-0.188281629	1					
Tingkat Pengangguran (%)	-0.837203214	-0.183386122	1				
Inflasi (%)	0.552026598	0.521860508	-0.589013426	1			
Gini Rasio	0.314457325	0.180036614	-0.450425786	-0.158284499	1		
Penduduk Miskin (%)	0.3742229	-0.965192255	-0.062625161	-0.371245947	-0.134143377	1	
UMK	0.133639888	0.91985013	-0.530826767	0.703837093	0.213397799	-0.785743886	1
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	-0.243168754	0.985548667	-0.126004926	0.554572951	0.014605312	-0.95158611	0.907022699

Sumber: Statistik Daerah Kota Magelang berbagai tahun dan Kota Magelang Dalam Angka Berbagai Tahun. (diolah)

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Buku ini ditujukan untuk mengkaji indikator makro ekonomi Kota Magelang. Untuk memberikan gambaran makro eksternal, sebelumnya, indikator makro ekonomi Indonesia dan Jawa Tengah juga dibahas. Kesimpulan dari hasil analisis terhadap indikator makro ekonomi Indonesia dan Jawa Tengah disajikan sebagai berikut. Untuk Indonesia, pertumbuhan PDB dan pertumbuhan PDB per kapita pada periode 2012-2015 memiliki kecenderungan menurun. Demikian pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk mengalami keberhasilan. Namun, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan formal, non formal, dan pelatihan ketrampilan kerja. Berikutnya, Inflasi Indonesia pada periode 2012-2015 bersifat fluktuatif. Inflasi tersebut disumbang oleh beberapa komoditas, misalnya premium, tarif listrik, angkutan dalam kota, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, cabai rawit, dan nasi dengan lauk sebesar. Inflasi

pada tahun 2013 dan 2014 terjadi karena adanya dampak dari penyesuaian harga premium dan solar. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap USD pada periode 2012-2015 cenderung menunjukkan tren yang melemah. Berikutnya, neraca perdagangan Indonesia defisit pada periode 2012-2014, namun surplus pada tahun 2015. Pada periode 2012-2015, nilai ekspor maupun impor menunjukkan tren menurun. Terakhir, IPM Indonesia pada periode 2012-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Tren tersebut memberi arti penduduk Indonesia semakin dapat mengakses sumber pendapatan, kesehatan, pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Selanjutnya adalah untuk Jawa Tengah. Pada periode 2013-2015, pertumbuhan PDRB Jawa Tengah cenderung menaik. Agak berbeda dengan pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah yang menurun pada 2014 dan meningkat kembali pada 2015. Inflasi Jawa Tengah pada periode 2012-2015 bersifat fluktuatif. Inflasi tersebut disumbang oleh beberapa komoditas, yakni telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, kue kering berminyak dan tomat sayur. Pada tahun 2013 dan 2014 Inflasi di Jawa Tengah disebabkan oleh adanya penyesuaian harga tarif tenaga listrik, harga elpiji 12 kg, dan harga premium dan solar. Berikutnya, data PAD dan dana perimbangan memperlihatkan Provinsi Jawa Tengah sedang

menuju kearah kemandirian. Berikutnya, neraca perdagangan Jawa Tengah pada periode 2012-2015 mengalami defisit. Terakhir, IPM Jawa Tengah pada periode 2012-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Hal tersebut mencerminkan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dapat mengakses sumber-sumber pendapatan, kesehatan, pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Kemudian, berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan secara umum untuk Kota Magelang bahwa Kota Magelang tidak mengalami *growth paradox* pada periode 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan *growth per kapita* yang menunjukkan tren meningkat; P0, P1, dan P2 yang memiliki tren membaik; dan kesempatan kerja yang juga menunjukkan tren yang meningkat. Secara lebih spesifik, dari hasil analisis diperoleh kesimpulan lainnya untuk Kota Magelang sebagai berikut:

1. Sumber daya ekonomi Kota Magelang relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.
2. Kemampuan Kota Magelang dalam menghasilkan kuantitas barang dan jasa secara relatif lebih rendah dari Eks Karesidenan Kedu lainnya.
3. Sumber daya ekonomi per kapita Kota Magelang secara relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.

4. Kemampuan Kota Magelang meningkatkan tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Eks Karesidenan Kedu lainnya.
5. Kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik Kota Magelang lebih tinggi dari Eks Karesidenan Kedu.
6. Tingkat perkembangan harga di tingkat produsen di Kota Magelang relatif rendah. Atau dengan kata lain, tingkat perkembangan harga di tingkat produsen di Kota Magelang masih relatif stabil. Perkembangan harga yang demikian dapat memberikan iklim ekonomi yang aman dan kondusif bagi semua pelaku ekonomi di Kota Magelang.
7. Peningkatan sumber daya ekonomi per kapita Kota Magelang secara relatif lebih besar apabila dibandingkan peningkatan mayoritas Eks Karesidenan Kedu lainnya.
8. Kemampuan Kota Magelang meningkatkan tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan mayoritas Eks Karesidenan Kedu lainnya.
9. Sektor andalan Kota Magelang terdiri dari 4 (empat) lapangan usaha, yakni: Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Pendidikan.
10. Sektor unggulan Kota Magelang terdiri dari 3 (tiga) lapangan usaha, yakni: Informasi dan Komunikasi; Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan.

11. Perekonomian Kota Magelang memerlukan pasokan dana yang cukup untuk para pelaku ekonomi di Kota Magelang.
12. Harga-harga kebutuhan hidup layak di Kota Magelang termasuk yang tertinggi di Eks Karesidenan Kedu, namun kenaikan harga-harga KHL di Kota Magelang tergolong yang terendah di Eks Karesidenan Kedu.
13. Aktivitas di sisi permintaan Kota Magelang lebih kuat dibandingkan dengan aktivitas di sisi penawaran. Ini karena aktivitas perekonomian Kota Magelang lebih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (58,39% [adhb]) daripada oleh aktivitas produksi barang dan jasa final (PMTB: 49,43% [adhb]).
14. Apabila dibandingkan antara tingkat pengangguran aktual (8,66%) dengan *natural rate of unemployment* (18,80%), maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Magelang mengalami *boom* pada periode 2011-2014.
15. Gini rasio yang menurun di Kota Magelang disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin.
16. Aktivitas ekonomi masyarakat di tiap-tiap kecamatan di Kota Magelang relatif homogen sehingga menghasilkan keuntungan-

keuntungan ekonomi yang relatif seragam. Contohnya, kecamatan-kecamatan di Kota Magelang cenderung bergerak di sektor yang sama, yakni sektor jasa dan usaha perdagangan.

17. Kemampuan Kota Magelang untuk menghasilkan produk dan menjualnya ke luar Kota Magelang masih lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat Kota Magelang dari luar Kota Magelang. Dengan kata lain, pengeluaran masyarakat Kota Magelang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa final yang dihasilkan oleh daerah lain di sekitarnya.
18. Pada periode 2012-2016 hubungan antara suku bunga pinjaman dan permintaan investasi di Kota Magelang bersifat inelastis. Ini menunjukkan bahwa pada periode 2012-2016 investasi di Kota Magelang dapat berhubungan dengan faktor-faktor lain di luar suku bunga pinjaman.
19. Setiap tahun, secara rata-rata, Kota Magelang membutuhkan investasi (PMTB) sebesar 1,6 triliun rupiah. Dengan nilai investasi tersebut, secara rata-rata, Kota Magelang dapat menghasilkan output sebesar 317,37 miliar rupiah.
20. Pada tahun 2013 ketika ICOR meningkat sebesar 3,73% kesempatan kerja meningkat 2,46%. Sebaliknya, pada tahun 2014 ketika ICOR menurun sebesar -13,94% persen kesempatan kerja

juga menurun sebesar -0,68%. Ini memberikan arti bahwa peningkatan efisiensi dalam kegiatan investasi terindikasi belum tentu membuka kesempatan kerja baru.

21. Tren derajat desentralisasi Kota Magelang makin naik. Sejak tahun 2014, Kota Magelang naik peringkat masuk dalam kategori cukup dan telah mencapai derajat desentralisasi 23,89 persen di tahun 2015.
22. Dalam matriks ketergantungan keuangan daerah, Kota Magelang dengan angka sebesar 66,65 persen berada dalam kategori sangat tinggi, artinya Pemerintah Kota Magelang sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Namun demikian, tren ketergantungan tersebut terus menurun. Hal ini terlihat dari 74,24 persen di tahun 2010 menjadi 59,23 persen di tahun 2015.
23. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang secara rata-rata untuk periode 2010-2015 adalah sebesar 21,87 persen. Angka tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, kemampuan keuangan Kota Magelang untuk melaksanakan otonomi daerah (pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari Pemerintah Pusat) masih rendah sekali. Kedua, dengan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Magelang adalah bersifat instruktif. Di sini, peran Pemerintah

Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Kota Magelang. Namun demikian, tren rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin semakin baik. Pada tahun 2015 Kota Magelang telah mencapai pola hubungan konsultatif dengan Pemerintah Pusat. Ini artinya pola pengarahan (campur tangan) dari pemerintah pusat telah mulai berkurang oleh karena kemampuan Pemerintah Kota Magelang telah mulai meningkat.

24. Secara rata-rata IRFD Kota Magelang masuk dalam kategori sedang. Itu berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang untuk menyediakan anggaran, misalnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, tidak akan menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah tersebut secara signifikan.
25. Pemerintah Kota Magelang tidak menerapkan kebijakan yang begitu ekspansif mengingat tingkat pengangguran aktual Kota Magelang berada di bawah natural rate of unemployment. Hal ini terindikasi dari Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 tercatat tidak memiliki utang. Tidak memiliki utang memang dapat berarti baik karena Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 tidak menyebabkan terjadinya *crowding out* dan atau karena kebutuhan dana Pemerintah Kota Magelang untuk membiayai

pembangunan sejauh ini dapat dipenuhi dari dana yang berasal dari PAD, dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, dan SiLPA.

26. Upaya pemerintah dan pelaku ekonomi Kota Magelang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan pengembangan teknologi lebih mendorong pengeluaran per kapita dibandingkan pertumbuhan penduduk.
27. Angka melek huruf, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita Kota Magelang tergolong tinggi untuk Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kota Magelang dapat dikatakan sudah lebih maju dibandingkan wilayah-wilayah lainnya, khususnya di Eks Karesidenan Kedu.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang telah diungkapkan, terdapat 4 (empat) poin penting yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang ekonomi Kota Magelang di masa yang akan datang. Empat poin penting tersebut adalah (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang yang *pro poor* dan *inclusiv* mengingat P0, P1, dan P2 masih dapat diperbaiki lagi, (2) terus melakukan perbaikan pada derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian

daerah untuk meningkatkan peran Pemerintah Kota Magelang dalam pembangunan ekonomi kota, (3) meningkatkan efisiensi sektor swasta melalui perbaikan ICOR, dan (4) menurunkan indeks Gini. Indeks Gini Kota Magelang saat ini berkisar di angka 0,34. Sebelumnya, indeks Gini Kota Magelang pernah mencapai 0.25 pada tahun 2006. Untuk mencapai empat poin penting tersebut Pemerintah Kota Magelang dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan berikut ini:

1. Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan sumber daya ekonomi.
2. Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi untuk dapat meningkatkan kuantitas barang dan jasa.
3. Pemerintah Kota Magelang perlu menjaga kestabilan harga-harga di pasar.
4. Pemerintah Kota Magelang perlu menjaga pasokan dana yang cukup untuk para pelaku ekonomi di Kota Magelang.
5. Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan investasi di sektor riil agar secara signifikan dapat membuka kesempatan kerja baru.

6. Pemerintah Kota Magelang perlu terus meningkatkan melalui inovasi dan pengembangan teknologi dalam rangka mendorong pengeluaran per kapita.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, Pemerintah Kota Magelang juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan berikut berdasarkan pada aspek SDM, regulasi, manajemen, dan infrastruktur.

1. Rekomendasi Kebijakan dari Aspek SDM

Dari aspek SDM, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah **melakukan pelatihan dan pendampingan usaha dalam bidang pemasaran (e-commerce) kepada masyarakat Kota Magelang secara kolaboratif antar OPD** yang bergerak pada lapangan usaha Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

2. Rekomendasi Kebijakan dari Aspek Regulasi

Dari aspek regulasi, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk **memperkuat kinerja keuangan daerah adalah melalui jalur kebijakan dan jalur tata kelola bekerjasama dengan perbankan**. Jalur kebijakan

harus melalui perda sementara jalur tata kelola melalui penyempurnaan administrasi pemungutan pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Hasil-hasil tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan program-program pengurangan kemiskinan.

3. Rekomendasi dari Aspek Manajemen

Dari aspek manajemen, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah **mengidentifikasi dan melakukan pemetaan industri-industri kreatif** yang berada di dalam lapangan usaha Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

4. Rekomendasi dari Aspek Infrastruktur

Dari aspek infrastruktur, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah:

(1) menyediakan infrastruktur perbankan dan transaksi elektronik untuk **menggerakkan transaksi non tunai** agar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Hal ini mengingat total pinjaman di Kota Magelang lebih besar dari total tabungan di Kota Magelang. Dengan banyaknya masyarakat yang

menyimpan uangnya di bank, maka akan mempermudah peran intermediasi perbankan di Kota Magelang.

(2) Dalam jangka pendek, pemerintah Kota Magelang perlu **memaksimalkan ruang fiskal untuk membantu masyarakat miskin**. Hal ini misalnya melalui pengalokasian ruang fiskal kepada Disnaker dan Diskoperindag secara lebih luas untuk menambah penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi kaum miskin, sekaligus mencari pasarnya. Hal ini bisa dilakukan untuk menambah gedung tempat kegiatan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam jangka panjang masyarakat miskin yang dapat berwirausaha diharapkan sudah meningkat pesat sehingga peran Pemerintah Kota Magelang dalam konteks ini dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., dan Posen, A. S. 1999. *Inflation Targeting*. Princeton University Press.
- Kameo, D. D., Sulandjari, S., Yuwono, P., Ariyani, Y., Trihandaru, S., Fevriera, S., dan Dwijayanti, S. 2012. *Modul Pelatihan Penyusunan Potensi Investasi Bagi Kabupaten & Kota*. Tisara Gambara.
- Mellor, J. W. 1990. "Dramatic poverty reduction in the Third World: prospects and needed action". The Australian Centre for International Agricultural Research and the National Centre for Development Studies the Australian National University, pp. 17-20.
- Piana, V. 2001. "A Graph Representation of a Basic Macroeconomic Scheme: The IS-LM Model". Economics Web Institute.
- Prasetyo, A., dan Anwar, A. 2017. "Tinjauan Angkutan Barang di Kota Magelang dengan Pendekatan Indeks Aksesibilitas", *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, vol. 17, no. 4, pp. 183-194.
- Pratomo, Y., dan Kalirajan, K. 2011. "Inflation and Growth Nexus in Indonesia after the Asian Financial Crisis, 1999-2007", *The Indian Economic Journal*, vol 59, no. 2, pp. 100-119.
- Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 2015

Sugiarto., Herlambang, T., Brastoro., Sudjana, R., dan Kelana, S. 2007.
Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif. PT Gramedia Pustaka
Utama: Jakarta.

<http://jateng.tribunnews.com/2015/11/21/daftar-umk-kabupaten-dan-kota-di-jateng-2016>;

<http://jateng.tribunnews.com/2014/11/20/ini-daftar-umk-kabupaten-kota-di-jateng-2015>; <http://www.lokersemarang.com/2013/11/daftar-upah-minimum-kabupaten-kota-umk.html>;

<http://www.solopos.com/2012/11/13/gubernur-jateng-tetapkan-umk-2013-347201>;

<http://www.lokersemarang.com/2011/11/upah-minimum-kabupatenkota-umk-jawa.html>.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota
Magelang menurut Lapangan Usaha**

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.683,38	116.293,53	123.201,21	132.299,35	135.991,13
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	747.152,98	814.549,79	934.259,11	1.043.860,07	1.128.331,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.425,53	16.366,48	17.277,01	18.352,32	20.361,13
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	7.411,28	7.621,25	8.044,19	8.501,88	8.979,24
F. Konstruksi	858.646,48	918.311,37	1.008.603,08	1.094.499,45	1.163.178,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	771.564,88	833.066,81	880.551,58	943.221,05	1.006.288,45
H. Transportasi dan Pergudangan	314.331,52	351.780,16	404.057,85	449.900,64	471.954,33
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[juta Rp]	274.817,74	302.699,77	340.420,44	379.472,18	422.789,76
J. Informasi dan Komunikasi	232.915,64	248.510,92	284.882,99	309.098,04	334.082,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	243.683,72	265.211,16	291.432,69	323.472,36	366.184,95
L. Real Estat	158.000,20	173.221,64	191.663,10	210.148,57	224.952,98
M,N. Jasa Perusahaan	15.387,73	16.994,48	19.071,66	21.893,87	24.810,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613.776,42	660.077,14	703.193,64	761.280,66	842.640,29
P. Jasa Pendidikan	310.843,40	387.046,30	440.078,24	478.794,89	529.008,56
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.257,66	138.266,12	159.857,42	178.393,69	195.466,24
R,S,T,U. Jasa Lainnya	94.247,90	106.925,77	119.677,13	127.389,85	140.360,73
PDRB	4.888.146,47	5.356.942,92	5.926.218,36	6.480.578,87	7.015.380,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota
Magelang menurut Lapangan Usaha**

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98.182,37	100.977,97	102.768,11	104.778,10	106.735,73
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Industri Pengolahan	660.615,63	706.975,94	753.425,70	793.617,97	826.943,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.908,74	17.812,17	18.448,16	18.669,18	19.086,34
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	7.306,77	7.345,64	7.545,25	7.694,76	7.868,22
F. Konstruksi	791.369,61	818.377,68	835.295,22	870.078,77	907.490,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	730.825,83	767.954,43	791.805,87	817.876,91	843.537,97
H. Transportasi dan Pergudangan	312.535,46	344.421,27	373.225,72	399.517,28	418.762,00
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum [luta Rp]	252.103,91	263.888,24	281.211,68	299.607,78	317.741,12
J. Informasi dan Komunikasi	234.771,59	255.630,11	297.579,12	321.935,50	346.840,64
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	214.434,16	224.119,33	235.148,55	250.146,63	273.803,59
L. Real Estat	154.353,38	167.087,52	175.297,92	185.857,48	196.518,98
M,N. Jasa Perusahaan	14.214,79	15.211,81	16.432,85	17.869,88	19.446,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546.939,79	561.491,84	558.632,28	581.970,21	615.023,35
P. Jasa Pendidikan	251.436,06	290.296,18	314.698,55	335.890,50	360.181,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.676,18	113.912,31	125.976,61	134.187,37	144.590,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	90.593,80	99.589,76	104.621,24	107.642,94	114.113,07
PDRB	4.484.268,08	4.755.092,20	4.992.112,82	5.247.341,27	5.518.684,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Lampiran 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,6	11,09	5,94	7,38	2,79
B. Pertambangan dan Penggalan	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	9,18	9,02	14,7	11,73	8,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,03	6,1	5,56	6,22	10,95
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	-0,6	2,83	5,55	5,69	5,61
F. Konstruksi	11,01	6,95	9,83	8,52	6,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,94	7,97	5,7	7,12	6,69
H. Transportasi dan Pergudangan	6,35	11,91	14,86	11,35	4,9
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[Rupa Rp]	7,12	10,15	12,46	11,47	11,42
J. Informasi dan Komunikasi	7,86	6,7	14,64	8,5	8,08
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	8,83	9,89	10,99	13,2
L. Real Estat	4,43	9,63	10,65	9,64	7,04
M,N. Jasa Perusahaan	10,86	10,44	11,9	15,12	13,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,11	7,54	6,53	8,26	10,69
P. Jasa Pendidikan	29,76	24,51	13,7	8,8	10,49
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,92	10,39	15,62	11,6	9,57
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,48	13,45	11,93	6,44	10,18
PDRB	9,49	9,59	10,63	9,35	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan Kota Magelang menurut Lapangan Usaha**

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	2,85	1,77	1,96	1,87
B. Pertambangan dan Penggalan	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	7,27	7,02	6,57	5,33	4,2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,11	11,96	3,57	1,2	2,23
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	-0,37	0,53	2,72	1,98	2,25
F. Konstruksi	6,99	3,41	2,07	4,16	4,3
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,9	5,08	3,11	3,29	3,14
H. Transportasi dan Pergudangan	5,86	10,2	8,36	7,04	4,82
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[Juta Rp]	2,88	4,67	6,56	6,54	6,05
J. Informasi dan Komunikasi	10,39	8,88	16,41	8,18	7,74
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,87	4,52	4,92	6,38	9,46
L. Real Estat	4,09	8,25	4,91	6,02	5,74
M,N. Jasa Perusahaan	8,2	7,01	8,03	8,74	8,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	2,66	-0,51	4,18	5,68
P. Jasa Pendidikan	18,76	15,46	8,41	6,73	7,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,39	4,82	10,59	6,52	7,75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,47	9,93	5,05	2,89	6,01
PDRB	5,37	6,04	4,98	5,11	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Lampiran 5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	2,17	2,08	2,04	1,94
B. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	15,28	15,21	15,76	16,11	16,08
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,31	0,29	0,28	0,29
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13
F. Konstruksi	17,57	17,14	17,02	16,89	16,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78	15,55	14,86	14,55	14,34
H. Transportasi dan Pergudangan	6,43	6,57	6,82	6,94	6,73
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[Ruta Rp]	5,62	5,65	5,74	5,86	6,03
J. Informasi dan Komunikasi	4,76	4,64	4,81	4,77	4,76
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,99	4,95	4,92	4,99	5,22
L. Real Estat	3,23	3,23	3,23	3,24	3,21
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,56	12,32	11,87	11,75	12,01
P. Jasa Pendidikan	6,36	7,23	7,43	7,39	7,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	2,58	2,7	2,75	2,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,93	2,00	2,02	1,97	2,00
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 6. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Kota Magelang menurut Lapangan Usaha**

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	2,12	2,06	2,00	1,93
B. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	14,73	14,87	15,09	15,12	14,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,37	0,37	0,36	0,35
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
F. Konstruksi	17,65	17,21	16,73	16,58	16,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,3	16,15	15,86	15,59	15,29
H. Transportasi dan Pergudangan	6,97	7,24	7,48	7,61	7,59
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum [Juta Rp]	5,62	5,55	5,63	5,71	5,76
J. Informasi dan Komunikasi	5,24	5,38	5,96	6,14	6,28
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,78	4,71	4,71	4,77	4,96
L. Real Estat	3,44	3,51	3,51	3,54	3,56
M,N. Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,2	11,81	11,19	11,09	11,14
P. Jasa Pendidikan	5,61	6,1	6,3	6,4	6,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,4	2,52	2,56	2,62
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,02	2,09	2,1	2,05	2,07
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	112,1	124,53	131,92	141,67	145,62
B. Pertambangan dan Penggalan	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	132,22	144,15	165,33	184,73	199,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	127,71	135,5	143,04	151,94	168,57
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	103,45	106,38	112,28	118,67	125,34
F. Konstruksi	117,23	125,37	137,7	149,42	158,8
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,12	126,46	133,67	143,18	152,75
H. Transportasi dan Pergudangan	110,65	123,84	142,24	158,38	166,14
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[uta Rp]	119,303	131,11	147,45	164,36	183,12
J. Informasi dan Komunikasi	119,83	127,85	147,57	159,03	171,88
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	121,79	132,55	145,65	161,67	183,01
L. Real Estat	113,76	124,72	138	151,31	161,97
M,N. Jasa Perusahaan	127,12	140,39	157,11	180,87	204,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	116,18	124,95	133,11	144,1	159,5
P. Jasa Pendidikan	177,91	221,53	251,88	274,04	302,78
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,24	153,71	177,71	198,31	217,29
R,S,T,U. Jasa Lainnya	106,59	120,93	135,35	144,08	158,75
PDRB	121,88	133,57	147,76	161,58	174,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar

Harga Berlaku Kota Magelang menurut Lapangan Usaha

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105,13	108,13	110,04	112,2	114,29
B. Pertambangan dan Penggalan	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	116,91	125,11	133,33	140,44	146,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	131,71	147,47	152,73	154,56	158,02
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	101,99	102,53	105,32	107,41	109,83
F. Konstruksi	108,04	111,73	114,04	118,79	123,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110,94	116,58	120,2	124,15	128,05
H. Transportasi dan Pergudangan	110,02	121,25	131,39	140,64	147,42
I. Penyediaan Akomodasi dan makan Minum[Juta Rp]	109,19	114,3	121,8	129,77	137,62
J. Informasi dan Komunikasi	120,79	131,52	153,1	165,63	178,44
J. Jasa Keuangan dan Asuransi	107,17	112,01	117,52	125,02	136,84
L. Real Estat	111,14	120,31	126,22	133,82	141,5
M,N. Jasa Perusahaan	117,43	125,66	135,75	147,62	160,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	103,53	106,29	105,74	110,16	116,42
P. Jasa Pendidikan	143,91	166,15	180,12	192,25	206,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,81	126,63	140,04	149,17	160,74
R,S,T,U. Jasa Lainnya	102,46	112,64	118,33	121,74	129,06
PDRB	111,81	118,56	124,47	130,83	137,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota
Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.852.811,52	3.190.294,62	3.480.356,54	3.761.371,65	4.017.143,51
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	901.879,49	1.008.170,38	1.093.900,90	1.181.211,09	1.281.630,40
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	123.728,14	128.489,19	138.801,46	147.910,38	156.807,13
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	559.974,93	621.217,95	696.374,66	744.516,85	784.739,07
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	207.530,19	222.665,64	246.986,10	267.618,70	288.431,28
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	817.046,16	943.444,26	1.007.931,03	1.092.639,74	1.146.178,82
1.f. Hotel dan restoran	187.299,45	206.515,55	232.051,76	256.688,60	283.938,99
1.g. lainnya	55.353,16	59.791,64	64.310,63	70.786,30	75.417,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	56.220,30	65.576,75	76.150,24	84.752,32	89.900,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	936.067,71	1.050.065,57	1.161.132,77	1.330.246,89	1.431.080,68
4. Pengeluaran PMTB	2.472.798,70	2.584.328,42	289.412,91	3.249.864,22	3.459.854,74
4.a. Bangunan	2.133.910,73	2.227.508,98	2.513.052,82	2.839.266,33	3.031.593,47
4.b. Non Bangunan	338.887,97	356.819,44	381.660,08	410.597,89	428.261,27
Pengeluaran Perubahan Inventori	284.010,22	257.395,68	208.211,94	218.692,52	153.174,70
Pengeluaran Ekspor	2.334.417,72	2.590.884,93	2.869.500,20	3.241.341,73	3.562.619,90
Pengeluaran Impor	4.048.179,71	4.381.603,05	4.763.846,24	5.405.690,46	5.698.393,82
PDRB	4.888.146,47	5.356.942,92	5.926.218,36	6.480.578,87	7.015.380,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota
Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.609.812,86	2.728.179,03	2.841.540,92	2.953.090,70	3.079.968,13
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	807.224,18	817.484,22	840.235,82	864.742,22	892.051,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115.691,96	120.256,52	125.820,70	131.189,64	137.793,29
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	507.798,50	533.169,35	561.600,62	584.145,07	605.155,40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	193.991,43	204.542,69	212.020,93	222.353,79	233.741,42
1.e. Taransportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	762.964,21	819.002,70	854.831,47	888.924,67	932.466,82
1.f. Hotel dan restoran	173.320,71	180.845,32	191.935,75	203.680,82	218.270,36
1.g. Lainnya	48.821,77	52.878,22	55.095,62	58.054,48	60.489,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	51.579,91	55.282,28	59.989,56	62.601,20	64.459,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	807.892,76	851.194,16	861.126,35	923.844,66	951.408,83
4. Pengeluaran PMTB	2.178.009,67	2.245.575,55	2.334.850,76	2.462.089,98	2.575.598,01
4.a. Bangunan	1.882.894,84	1.947.353,08	2.048.374,37	2.178.716,92	2.291.287,94
4.b. Non Bangunan	295.114,83	298.222,46	286.476,38	283.372,06	284.310,06
Pengeluaran Perubahan Inventori	325.544,73	152.721,50	131.403,32	71.301,68	79.291,30
Pengeluaran Ekspor	1.827.271,98	1.980.704,39	2.020.259,87	2.185.784,68	2.306.763,36
Pengeluaran Impor	3.315.843,83	3.258.564,71	3.287.057,95	3.411.370,64	3.538.804,57
PDRB	4.484.268,08	4.755.092,20	4.992.112,82	5.247.341,27	5.518.684,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 1.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,40	11,83	9,09	8,07	6,80
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	5,89	11,79	8,50	7,98	8,50
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,84	3,85	8,03	6,56	6,01
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pengeluaran Rumah Tangga	11,04	10,94	12,10	6,91	5,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,49	7,29	10,92	8,35	7,78
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	12,75	15,47	6,84	8,40	4,90
1.f. Hotel dan restoran	8,76	10,26	12,37	10,62	10,62
1.g. Lainnya	17,00	8,02	7,56	10,07	6,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	12,92	16,64	16,12	11,30	6,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,70	12,18	10,58	14,56	7,58
4. Pengeluaran PMTB	8,02	3,10	3,98	5,45	4,61
4.a. Bangunan	13,53	4,39	12,82	12,98	6,77
4.b. Non Bangunan	23,46	5,29	6,96	7,58	4,30
Pengeluaran Perubahan Inventori	43,78	-9,37	-19,11	5,03	-29,96
Pengeluaran Ekspor	21,82	21,75	21,75	12,96	9,91
Pengeluaran Impor	22,48	14,52	2,09	13,47	5,41
PDRB	9,49	9,60	10,31	9,35	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,07	4,54	4,16	3,93	4,30
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	0,95	1,27	2,78	2,92	3,16
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,94	3,95	4,63	4,27	5,03
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,06	5,00	5,33	4,01	3,60
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,21	5,44	3,66	4,87	5,12
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8,77	7,34	4,37	3,99	4,90
1.f. Hotel dan restoran	5,22	4,34	6,13	6,12	7,16
1.g. Lainnya	9,24	8,31	4,19	5,37	4,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,28	7,18	8,51	4,35	2,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,11	5,36	1,17	7,28	2,98
4. Pengeluaran PMTB	8,02	3,10	3,98	5,45	4,61
4.a. Bangunan	6,85	3,42	5,16	6,36	5,17
4.b. Non Bangunan	16,16	1,05	-3,94	-1,08	0,33
Pengeluaran Perubahan Inventori	80,92	-53,09	-13,96	-45,74	11,21
Pengeluaran Ekspor	11,01	8,40	3,51	6,61	5,53
Pengeluaran Impor	14,24	-1,73	0,87	3,78	3,74
PDRB	5,37	6,04	4,98	5,11	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 13. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015 *	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,36	59,55	58,73	58,04	57,26
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	18,45	18,82	18,46	18,23	18,27
1.b. Pakaiian dan Alas Kaki	2,53	2,40	2,34	2,28	2,24
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,46	11,60	11,75	11,49	11,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,25	4,16	4,17	4,13	4,11
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	16,71	17,61	17,01	16,86	16,34
1.f. Hotel dan restoran	3,83	3,86	3,92	3,96	4,05
1.g. Lainnya	1,13	1,12	1,09	1,09	1,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	1,15	1,22	1,28	1,31	1,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,15	19,60	19,59	20,53	20,40
4. Pengeluaran PMTB	50,59	48,24	48,85	50,15	49,32
4.a. Bangunan	43,65	41,58	42,41	43,81	43,21
4.b. Non Bangunan	6,93	6,66	6,44	6,34	6,10
Pengeluaran Perubahan Inventori	5,81	4,80	3,51	3,37	2,18
Pengeluaran Ekspor	47,78	48,36	48,42	50,02	50,78
Pengeluaran Impor	82,82	81,79	80,39	83,41	81,23
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 14. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,20	57,37	56,92	56,28	55,81
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	34,03	34,47	35,42	36,46	37,61
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,88	5,07	5,30	5,53	5,81
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyenggaraan Rumah Tangga	21,41	22,48	23,68	24,63	25,51
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,18	8,62	8,94	9,37	9,85
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	32,17	34,53	36,04	37,48	39,31
1.f. Hotel dan restoran	7,31	7,62	8,09	8,59	9,20
1.g. Lainnya	2,06	2,23	2,32	2,45	2,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,15	1,16	1,20	1,19	1,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,02	17,90	17,25	17,61	17,24
4. Pengeluaran PMTB	48,57	47,22	46,77	46,92	46,67
4.a. Bangunan	86,45	86,72	87,73	88,49	88,96
4.b. Non Bangunan	13,55	13,28	12,27	11,51	11,04
Pengeluaran Perubahan Inventori	7,26	3,21	2,63	1,36	1,44
Pengeluaran Ekspor	40,75	41,65	41,07	41,66	41,80
Pengeluaran Impor	73,94	68,63	65,85	65,01	64,12
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 15. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	109,31	116,94	122,48	127,37	130,43
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	111,73	123,33	130,19	136,60	143,67
1.b. Pakaiian dan Alas Kaki	106,95	106,85	110,32	112,75	113,80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,28	116,51	124,00	127,45	129,68
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	106,98	108,86	116,49	120,36	123,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	107,09	115,19	117,91	122,92	122,92
1.f. Hotel dan restoran	108,07	114,19	120,90	126,02	130,09
1.g. Lainnya	113,38	113,07	116,73	121,93	124,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	109,00	118,62	126,94	135,38	139,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	115,87	123,36	134,84	143,99	150,42
4. Pengeluaran PMTB	113,53	115,09	123,98	132,00	134,33
4.a. Bangunan	113,33	114,39	122,69	130,32	132,31
4.b. Non Bangunan	114,83	119,65	133,23	144,90	150,63
Pengeluaran Perubahan Inventori	87,24	168,54	158,45	306,71	193,18
Pengeluaran Ekspor	127,75	130,81	139,96	148,29	154,44
Pengeluaran Impor	122,09	134,46	144,93	158,46	161,03
PDRB	109,01	112,66	118,71	123,50	127,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 16. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Berlaku Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	120,28	134,50	146,73	158,58	169,36
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	113,37	126,73	137,50	148,48	161,10
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115,78	120,23	129,88	138,41	146,73
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyenggaraan Rumah Tangga	123,30	136,79	153,33	163,94	172,79
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	118,30	126,93	140,79	152,55	164,41
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	127,82	147,60	157,68	170,94	179,31
1.f. Hotel dan restoran	116,66	128,63	144,53	159,88	176,85
1.g. Lainnya	137,93	148,99	160,25	176,39	187,93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	121,12	141,28	164,06	182,59	193,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	122,68	137,62	152,18	174,34	187,56
4. Pengeluaran PMTB	125,81	131,48	147,28	165,35	176,03
4.a. Bangunan	122,27	127,63	143,99	162,68	173,70
4.b. Non Bangunan	153,89	162,03	173,31	186,45	194,47
Pengeluaran Perubahan Inventori	1.647,47	1.493,08	1.207,78	1.268,58	888,52
Pengeluaran Ekspor	164,13	199,83	198,35	224,06	246,27
Pengeluaran Impor	157,41	180,27	184,04	208,84	220,14
PDRB	121,87	133,57	147,34	161,12	174,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

**Lampiran 17. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan Kota Magelang menurut Penggunaan**

Nama	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110,03	115,02	119,80	124,50	129,85
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	101,47	102,76	105,62	108,70	112,13
1.b. Pakaiian dan Alas Kaki	108,26	112,53	117,74	122,76	128,94
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111,81	117,40	123,66	128,62	133,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	110,58	116,59	120,86	126,75	133,24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	119,36	128,13	133,73	139,07	145,88
1.f. Hotel dan restoran	107,95	112,64	119,55	126,86	135,95
1.g. Lainnya	121,66	131,76	137,29	144,66	150,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	111,12	119,10	129,24	134,87	138,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	105,88	111,56	112,86	121,08	124,69
4. Pengeluaran PMTB	110,81	114,25	118,79	125,27	131,04
4.a. Bangunan	107,88	111,58	117,37	124,83	131,28
4.b. Non Bangunan	134,01	135,42	130,09	128,68	129,10
Pengeluaran Perubahan Inventori	1.888,40	885,90	762,23	413,60	459,95
Pengeluaran Ekspor	162,95	136,92	141,72	151,09	159,45
Pengeluaran Impor	148,09	125,89	126,99	131,79	136,71
PDRB	111,80	118,22	124,11	130,46	137,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA MAGELANG TAHUN 2017



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA MAGELANG**



Jl. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Kota Magelang



datago@magelangkota.go.id



0293 - 360990

dataGo
Sistem Informasi Manajemen Data Strategis Kota Magelang



datago.magelangkota.go.id



[datagodatago](https://twitter.com/datagodatago)